



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)

BAPPERIDA



2025



www.bappeda.baritoselatankab.go.id



bappedabarselkab@gmail.com



052521504



Jl. Pahlawan KM.06 Buntok

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur selalu tercurah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Karunia-Nya, sehingga masih diberi kesempatan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025. Penyusunan LAKIP tahun 2025 merupakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 ini merupakan instrumen penting dalam menilai sejauh mana tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja yang menggambarkan pencapaian kinerja secara terperinci serta sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan selama Tahun 2025. Diharapkan LAKIP ini dapat memberikan informasi kepada seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja dalam tahun 2025.

LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan Evaluasi bagi peningkatan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam Rangka mencapai tujuan pembangunan daerah dimasa yang akan datang.

Buntok,

2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN



DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | 1 |
| BAB I PENDAHULUAN | 2 |
| 1.1 Dasar Pembentukan Organisasi | 2 |
| 1.2 Tugas dan Fungsi..... | 2 |
| 1.3 Struktur Organisasi | 3 |
| 1.4 Isu Strategis Organisasi | 5 |
| 1.5 Sistematika Laporan | 7 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 9 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 12 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi..... | 12 |
| b. Realisasi Anggaran..... | 65 |
| BAB IV P E N U T U P | 76 |
| 1. Kesimpulan..... | 76 |
| 2. Langkah strategis di masa mendatang..... | 77 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2. 1 Sasaran, Indikator, target dalam perjanjian kinerja Tahun 2025 | 10 |
| Tabel 2. 2 Sasaran, Indikator, target dalam perjanjian kinerja Tahun 2025 | 10 |
| Tabel 2. 3 Program dan Anggaran dalam perjanjian kinerja | 11 |
| Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran | 13 |
| Tabel 3. 2 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2025..... | 13 |
| Tabel 3. 3 Progres Capaian Keberhasilan Pemerintah Kab. Barito Selatan | 16 |
| Tabel 3. 4 Progres Capaian Area Perencanaan | 16 |
| Tabel 3. 5 Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan pada IGA Award | 21 |
| Tabel 3. 6 Kajian yang terimplementasi..... | 39 |
| Tabel 3. 7 Indikator, Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025 | 56 |
| Tabel 3. 8 Pengukuran Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Target | 59 |
| Tabel 3. 9 Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional | 59 |
| Tabel 3. 10 Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional | 60 |
| Tabel 3. 11 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Capaian Kinerja | 61 |
| Tabel 3. 12 Indikator, Target, Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025..... | 63 |
| Tabel 3. 13 Realisasi Anggaran Bappeda Tahun Anggaran 2025 | 66 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan..... | 4 |
| Gambar 3. 1 Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Penyusunan Kajian Daerah | 42 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Dalam rangka menjamin perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1980 dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

Sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan; dan ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan telah dikukuhkan pada tanggal 30 Januari 2025.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

1.2.1. Tugas :

Membantu Bupati dalam membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perencanaan pembangunan, riset dan penelitian, inovasi dan pengembangan.

1.2.2. Fungsi :

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- b. perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi serta statistik daerah;

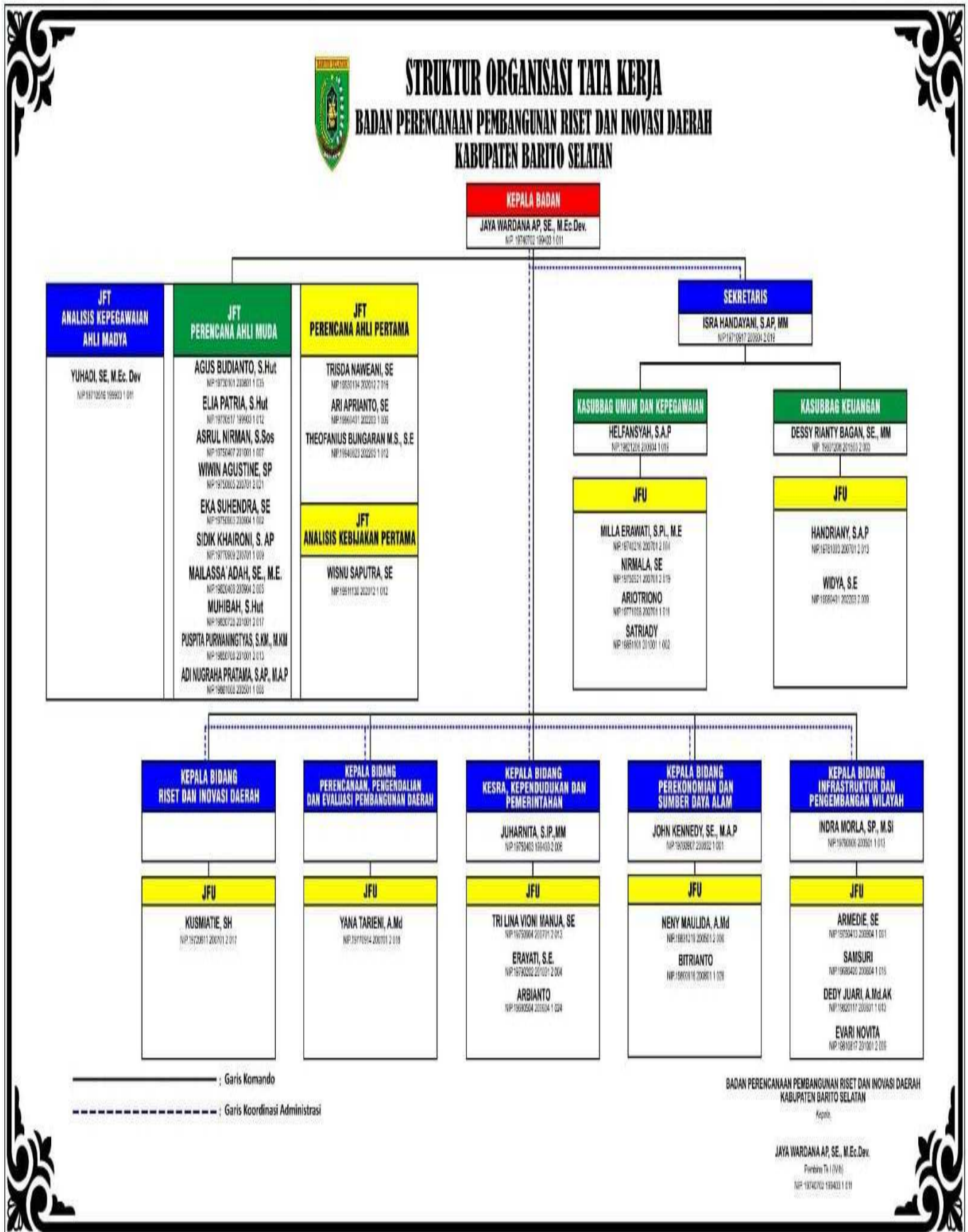
- c. pengoordinasian Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. menghimpun, memfasilitasi, membina dan melaporkan pembuatan/ pengembangan riset dan inovasi di daerah;
- e. pengendalian kesesuaian antar indikator, kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), output hasil kegiatan di Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
- f. pengoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pembangunan perekonomian, pembangunan prasarana dan sarana, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan tata praja, pembangunan aparatur keuangan;
- g. pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas negara, lintas daerah, lintas urusan pemerintah, antar pemerintah daerah dengan pusat dan antar lintas pelaku lainnya; dan
- h. penyelenggaraan pengoordinasian statistik daerah.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub. Bagian Keuangan
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- e. Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan.
- f. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi dapat dilihat seperti dibawah ini :
 Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan



1.4 Isu Strategis Organisasi

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel, yang memerlukan dukungan dari berbagai unsur pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan BAPPEDA yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah kerana dampaknya yang signifikan bagi daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan di BAPPEDA, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BAPPEDA dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya pemanfaatan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.;
2. Penataan database dan informasi perencanaan pembangunan yang belum terorganisasi dengan baik.;
3. Kurang optimalnya koordinasi dengan perangkat daerah sebagai penyedia/sumber data, dan mekanisme sinkronisasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.;
4. Kurang optimalnya peran litbang dan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Melihat identifikasi permasalahan di BAPPEDA dapat dirumuskan faktor

pendorong dan penghambat pelayanan BAPPEDA yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Faktor Pendorong :

1. Dukungan teknologi informasi dan jejaring dengan pengelola di kementerian untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi tingkat Pusat dan Daerah;
2. Dukungan teknologi informasi dan jejaring dengan aktor di kementerian kunci memudahkan koordinasi;
3. Terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik;
4. Pengembangan dan pemanfaatan inovasi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah untuk perencanaan pembangunan daerah

Faktor Penghambat :

1. Monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara perencanaan dan implementasi pelaksanaan program serta koordinasi dan sinkronisasi belum dimanfaatkan secara optimal.
2. Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang database dan belum terintegrasinya sistem manajemen database perencanaan Pembangunan;
3. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM perencana yang handal dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah baik internal maupun eksternal sehingga
4. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM perencana yang handal dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi maka dapat ditentukan isu strategis Bappeda sebagai berikut :

1. Adanya tuntutan keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui kegiatan musrenbang dari tingkat desa hingga kabupaten
2. Perlunya analisa terhadap usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah sehingga terdapat keselarasan output, outcome yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah;
3. Peningkatan Kompetensi SDM dalam pemberian layanan masyarakat yang mudah, murah dan berkualitas;
4. Hasil riset/penelitian ilmiah sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan, juga sebagai dasar keberadaan program dan kegiatan PD
5. Tuntutan transparansi dan terintegrasi kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksana dan pelaporan keuangan daerah/Negara.
6. Program dan kegiatan harus memiliki indikator kinerja yang terukur
7. Penentuan unit cost dari seluruh layanan/kegiatan.

1.5 Sistematika Laporan

Sistematika yang dianjurkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB V Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses penyusunan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan, perencanaan kinerja disusun dan kemudian ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan pembuatan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk mencapai sasaran maka perlu untuk menetapkan indikator dan target kinerja yang menjadi indikator kinerja utama Bappeda dan kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja agar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dapat lebih terarah untuk dapat memastikan pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Barito Selatan.

Ringkasan isi perjanjian kinerja Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 disajikan pada berikut ini :

Tabel 2. 1 Sasaran, Indikator, target dalam perjanjian kinerja Tahun 2025 (Periode Renstra 2023-2026)

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target |
|----|---|--|----------|----------|
| 1 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel | Nilai SAKIP BAPPEDA | Predikat | B |
| | | Opini BPK | Predikat | WTP |
| | | Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK/Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD | Indeks | 80,00 |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi Pembangunan daerah | Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) | Persen | 100% |
| 3 | Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan masyarakat | Indeks Inovasi Daerah pada penilaian IGA | Predikat | Inovatif |
| | | Jumlah Kajian Kelitbangan yang di implementasikan | Kajian | 1 |

Tabel 2. 2 Sasaran, Indikator, target dalam perjanjian kinerja Tahun 2025 (Periode Renstra 2025-2029)

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target |
|----|--|---|---------------|-----------|
| 1 | Meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Barito Selatan | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | Indeks | Baik |
| | | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | | 3,10 |
| | | Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah | Nilai (0-100) | 80,00 |
| | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah | Nilai | B |
| 2 | Mewujudkan ketahanan energi melalui penggunaan penerapan ekonomi hijau dan Energi Baru Terbarukan (EBT) Kabupaten Barito Selatan | Persentase Kebijakan Berbasis Bukti | Persen (%) | 71 |
| | | Indeks Inovasi Daerah | Indeks/Nilai | Innovatif |

Tabel 2. 3 Program dan Anggaran dalam perjanjian kinerja

| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|----|--|------------------|------------|
| 1. | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Rp.7.510.244.972 | APBD |
| 2. | Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan | Rp.1.247.679.000 | APBD |
| 3. | Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah | Rp.2.788.890.000 | APBD |
| 4. | Program penelitian dan pengembangan | Rp.3.533.122.294 | APBD |

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, seiring dengan perubahan periode Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dari periode 2023–2026 menuju periode 2025–2029. Pada awal tahun anggaran 2025, dokumen perencanaan kinerja, termasuk Perjanjian Kinerja, masih mengacu pada sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra periode sebelumnya. Hal ini disebabkan karena proses penyusunan dan penetapan Renstra periode 2025–2029 masih berlangsung pada saat dokumen perencanaan tahunan disusun.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2, sasaran strategis yang digunakan pada awal penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra periode 2023–2026, yang berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, peningkatan akuntabilitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, serta peningkatan kualitas inovasi dan pelayanan kepada masyarakat. Sasaran tersebut diukur melalui beberapa indikator kinerja utama seperti Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Opini BPK, Indeks Pencegahan Korupsi (MCP KPK), persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah, serta Indeks Inovasi Daerah.

Selanjutnya, setelah ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, dilakukan penyesuaian terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja yang menjadi dasar pengukuran kinerja perangkat daerah. Sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3, sasaran strategis pada periode Renstra yang baru diarahkan pada peningkatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penyesuaian tersebut juga diikuti dengan perubahan indikator kinerja utama, antara lain melalui penggunaan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah, serta nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka dalam pengukuran dan pelaporan kinerja Tahun 2025 digunakan indikator dan target kinerja yang telah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengukuran kinerja perangkat daerah tetap konsisten dengan arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang berlaku pada periode perencanaan pembangunan daerah yang terbaru, sehingga akuntabilitas kinerja organisasi tetap terjaga dan selaras dengan prinsip sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju good governance berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture-set penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (output) menjadi berorientasi kinerja (outcome) merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun. Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun sasaran yang akan dicapai merupakan gambaran indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan. Tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran

| Tujuan | Sasaran |
|--|---|
| Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dan Akuntabel | Meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Barito Selatan. |
| | Mewujudkan ketahanan energi melalui penggunaan penerapan ekonomi hijau dan Energi Baru Terbarukan (EBT) Kabupaten Barito Selatan. |

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja yaitu rumus bagi IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja. Berikut ini tabel pengukuran kinerja :

Tabel 3. 2 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2025

| No | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Capaian Kinerja |
|----|--|----------------|--|--|
| 1 | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | Baik | Indeks Perencanaan Pembangunan daerah masih dalam proses oleh Bapperida Provinsi Kalimantan tengah (hasil belum rilis) | Indeks Perencanaan Pembangunan daerah masih dalam proses oleh Bapperida Provinsi Kalimantan tengah (hasil belum rilis) |
| 2 | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 3,10 | Tidak dilakukan penilaian oleh BPKP karena yang dilakukan penilaian hanya yang menjadi sampel. | Tidak dilakukan penilaian oleh BPKP karena yang dilakukan penilaian hanya yang menjadi sampel. |

| | | | | |
|---|---|----------|-----------|------|
| 3 | Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah | 80,00 | 89,78 | 112% |
| 4 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah | B | B | 100% |
| 5 | Persentase Kebijakan Berbasis Bukti | 71 | 14 kajian | 93% |
| 6 | Indeks Inovasi Daerah | Inovatif | Inovatif | 100% |

Adapun penjelasan dari capaian kinerja dari target kinerja adalah sebagai berikut:

| | |
|-------------------|--|
| Indikator Kinerja | : Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Target | : Baik |
| Realisasi Kinerja | : Indeks Perencanaan Pembangunan daerah masih dalam proses oleh Bapperida Provinsi Kalimantan tengah (hasil belum rilis) |

Indikator kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki target kinerja pada tahun berjalan dengan kategori Baik. Namun demikian, hingga penyusunan laporan kinerja ini dilakukan, nilai realisasi indikator tersebut belum dapat disajikan secara kuantitatif. Hal ini dikarenakan proses pengukuran dan penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah masih dalam tahap pelaksanaan oleh Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pihak yang melakukan penilaian. Dengan demikian, nilai realisasi indikator akan diketahui setelah hasil penilaian resmi dirilis oleh instansi yang berwenang. Pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait tetap berkomitmen untuk mendukung proses penilaian tersebut melalui penyediaan data dan dokumen perencanaan yang diperlukan.

| | |
|-------------------|------------------|
| Indikator Kinerja | : Maturitas SPIP |
| Target | : 3,10 |
| Realisasi Kinerja | : 3,027 |

Capaian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan serta efektivitas sistem pengendalian internal pada pemerintah daerah. Berdasarkan hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi yang telah dilaksanakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan memperoleh Level 3 dengan skor 3,027. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 700/75/INSP/2024 tanggal 5

Februari 2025, yang menerangkan bahwa hasil Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 berada pada Level 3 dengan skor 3,027.

Level tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah berada pada tahap terdefinisi (defined), dimana kebijakan, prosedur pengendalian intern, serta penerapan manajemen risiko telah dilaksanakan secara lebih sistematis dan mulai terintegrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan kinerja perangkat daerah.

Selanjutnya, berdasarkan surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PE.09.04/S-456/D4/04/2025 tanggal 30 Desember 2024 perihal penetapan hasil evaluasi penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025, disebutkan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah tidak termasuk dalam daerah yang dilakukan evaluasi maturitas SPIP pada tahun berjalan. Dengan demikian, pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk Kabupaten Barito Selatan, tidak menjadi objek evaluasi SPIP pada tahun 2025. Oleh karena itu, capaian nilai maturitas SPIP pada laporan ini masih mengacu pada hasil evaluasi terakhir yang menyatakan bahwa maturitas SPIP Kabupaten Barito Selatan berada pada Level 3 dengan skor 3,027.

Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja, yaitu tingkat maturitas SPIP sebesar 3,10, maka capaian tersebut menunjukkan bahwa kondisi maturitas SPIP Kabupaten Barito Selatan sudah berada pada level yang mendekati target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dalam upaya penguatan pengendalian intern pemerintah daerah, khususnya dalam aspek penerapan manajemen risiko, pengendalian kegiatan, serta peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP melalui penguatan sistem pengendalian intern, peningkatan integrasi manajemen risiko dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, serta optimalisasi fungsi pengawasan internal. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan tingkat maturitas SPIP pada periode evaluasi berikutnya sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

| | | |
|-------------------|---|---|
| Indikator Kinerja | : | Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK/ Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD |
| Target | : | 80 |
| Realisasi Kinerja | : | 89,78 |

Area Perencanaan merupakan salah satu fokus dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK yang bertujuan untuk memastikan proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pada Pemerintah Kabupaten Barito

Selatan, pelaksanaan dan pemenuhan indikator pada area ini dikoordinasikan oleh Bapperida bersama perangkat daerah terkait. Berdasarkan data MCSP KPK per 15 Januari 2025, capaian nilai area Perencanaan Kabupaten Barito Selatan tercatat sebesar 87,98. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar indikator yang dipersyaratkan dalam area perencanaan telah dipenuhi, baik dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun pemenuhan eviden yang diunggah dalam sistem MCP KPK yang dapat dilihat pada gambar 3.3 dan 3.4 berikut :

Tabel 3. 3 Progres Capaian Keberhasilan Pemerintah Kab. Barito Selatan



Tabel 3. 4 Progres Capaian Area Perencanaan

| No | Area Penilaian MCP KPK | Penanggung Jawab | Nilai |
|----|------------------------|----------------------------------|-------|
| 1 | M-ASN | BKPSDM | 96.79 |
| 2 | Perencanaan | Bapperida, Dinsos, Kesra | 87.98 |
| 3 | PBJ | PBJ Setda Kab Barsel | 86.32 |
| 4 | APIP | Inspektorat | 82.92 |
| 5 | Yanblik | PTSP, Disdik, Dnkes, Disdukcapil | 75.98 |
| 6 | OPD | Bapenda | 75.98 |
| 7 | Anggaran | BPKAD | 70.85 |
| 8 | BMD | BPKAD | 66.80 |
| 9 | Anggaran | BPKAD | 53.67 |
| 7 | BMD | BPKAD | 53.67 |

Capaian ini mencerminkan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah telah berjalan dengan cukup baik serta telah mendukung upaya pencegahan korupsi melalui sistem perencanaan yang lebih transparan dan terintegrasi. Capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain tersedianya dokumen perencanaan daerah secara lengkap dan terintegrasi, seperti RPJMD, RKPD, serta dokumen perencanaan perangkat daerah, serta adanya koordinasi yang cukup baik antara Bapperida dan perangkat daerah dalam memenuhi indikator yang menjadi penilaian MCP KPK. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi perencanaan juga turut mendukung proses pengelolaan dokumen dan pelaporan yang lebih tertib dan akuntabel. Namun

demikian, nilai capaian tersebut masih belum mencapai nilai maksimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih adanya beberapa dokumen atau eviden pendukung yang perlu disempurnakan, baik dari aspek kelengkapan dokumen maupun kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Sebagai upaya peningkatan capaian pada periode berikutnya, Bapperida akan terus memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam pemenuhan indikator MCP KPK pada area perencanaan, meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen perencanaan, serta memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan daerah. Dengan langkah tersebut diharapkan nilai capaian area perencanaan pada MCP KPK Kabupaten Barito Selatan dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.

| | |
|-------------------|---------------|
| Indikator Kinerja | : NILAI SAKIP |
| Target | : B |
| Realisasi Kinerja | : 100% |

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pada tahun sebelumnya, tingkat akuntabilitas kinerja Bapperida menunjukkan capaian yang cukup baik. Berdasarkan hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Bapperida memperoleh nilai sebesar 69,50 dengan kategori B. Capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya perbaikan yang dilakukan dalam penguatan perencanaan kinerja, penyelarasan indikator kinerja dengan dokumen perencanaan, serta peningkatan kualitas pelaporan kinerja yang lebih berorientasi pada hasil. Atas capaian tersebut, Bapperida juga memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah sebagai perangkat daerah dengan nilai AKIP terbaik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Bapperida dalam mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi. Adapun untuk Tahun 2025, proses evaluasi terhadap implementasi SAKIP pada Bapperida masih dalam tahap penilaian oleh Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Oleh karena itu, nilai SAKIP Tahun 2025 belum dapat disajikan dalam laporan ini dan akan ditetapkan setelah seluruh tahapan evaluasi selesai dilaksanakan.

Ke depan, Bapperida terus berupaya melakukan berbagai langkah perbaikan dalam implementasi SAKIP, antara lain melalui penguatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, peningkatan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran,

serta penyempurnaan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai SAKIP pada periode berikutnya serta memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

| | | |
|-------------------|---|--|
| Indikator Kinerja | : | Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA |
| Target | : | Inovatif |
| Realisasi Kinerja | : | Inovatif |

Capaian kinerja tahun 2025 pada indikator Indeks Inovasi Daerah (IID) telah memenuhi target yang ditetapkan, yaitu berada pada kategori Inovatif. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah, Kabupaten Barito Selatan pada kategori kabupaten memperoleh skor indeks sebesar 61,78 dan menempati peringkat ke-91 secara nasional. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja inovasi daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya Kabupaten Barito Selatan berada pada peringkat ke-125 dengan skor indeks sebesar 54,80, meskipun pada saat itu juga masih berada dalam kategori Inovatif. Dengan demikian, pada tahun 2025 terjadi peningkatan nilai indeks sebesar 6,98 poin serta perbaikan peringkat sebesar 34 tingkat, yang mencerminkan adanya penguatan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan dan implementasi inovasi di berbagai sektor pembangunan.

Hasil penilaian tersebut merujuk pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025. Peningkatan capaian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi perangkat daerah untuk terus mengembangkan inovasi yang berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah.



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 400.10.11 - 6097 TAHUN 2025

TENTANG

INDEKS INOVASI DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2025

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap laporan penerapan inovasi daerah dan mengusulkan calon penerima penghargaan inovasi daerah;
- b. Bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengukuran indeks inovasi daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

| No | Pemerintah Daerah | Skor Indeks | Predikat |
|------|-----------------------------------|-------------|----------|
| 90. | Kabupaten Bulukumba | 62,10 | Inovatif |
| 91. | Kabupaten Barito Selatan | 61,78 | Inovatif |
| 92. | Kabupaten Magetan | 61,71 | Inovatif |
| 93. | Kabupaten Cilacap | 61,67 | Inovatif |
| 94. | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 61,63 | Inovatif |
| 95. | Kabupaten Halmahera Tengah | 61,47 | Inovatif |
| 96. | Kabupaten Sambas | 60,94 | Inovatif |
| 97. | Kabupaten Banjar | 60,71 | Inovatif |
| 98. | Kabupaten Pematang | 60,65 | Inovatif |
| 99. | Kabupaten Nganjuk | 60,49 | Inovatif |
| 100. | Kabupaten Karo | 60,36 | Inovatif |
| 101. | Kabupaten Pasaman Barat | 60,17 | Inovatif |
| 102. | Kabupaten Bojonegoro | 59,93 | Inovatif |
| 103. | Kabupaten Karanganyar | 59,89 | Inovatif |
| 104. | Kabupaten Gunung Mas | 59,83 | Inovatif |
| 105. | Kabupaten Kutai Kartanegara | 59,81 | Inovatif |
| 106. | Kabupaten Ogan Komering Ilir | 59,69 | Inovatif |
| 107. | Kabupaten Pelalawan | 59,65 | Inovatif |
| 108. | Kabupaten Barru | 59,28 | Inovatif |
| 109. | Kabupaten Lampung Barat | 59,03 | Inovatif |
| 110. | Kabupaten Majalengka | 59,00 | Inovatif |
| 111. | Kabupaten Pasaman | 58,91 | Inovatif |
| 112. | Kabupaten Karangasem | 58,86 | Inovatif |
| 113. | Kabupaten Lombok Timur | 58,74 | Inovatif |
| 114. | Kabupaten Lombok Utara | 58,54 | Inovatif |
| 115. | Kabupaten Sumenep | 58,52 | Inovatif |
| 116. | Kabupaten Kampar | 58,43 | Inovatif |
| 117. | Kabupaten Belitung Timur | 58,29 | Inovatif |
| 118. | Kabupaten Malinau | 58,21 | Inovatif |
| 119. | Kabupaten Gresik | 57,98 | Inovatif |
| 120. | Kabupaten Lebak | 57,79 | Inovatif |
| 121. | Kabupaten Bekasi | 57,71 | Inovatif |
| 122. | Kabupaten Batu Bara | 57,64 | Inovatif |
| 123. | Kabupaten Subang | 57,29 | Inovatif |
| 124. | Kabupaten Garut | 57,22 | Inovatif |
| 125. | Kabupaten Luwu Timur | 56,87 | Inovatif |
| 126. | Kabupaten Pesisir Selatan | 56,75 | Inovatif |
| 127. | Kabupaten Humbang Hasundutan | 56,43 | Inovatif |
| 128. | Kabupaten Tanah Laut | 56,40 | Inovatif |
| 129. | Kabupaten Kotawaringin Timur | 56,34 | Inovatif |
| 130. | Kabupaten Bangka Selatan | 56,26 | Inovatif |
| 131. | Kabupaten Probolinggo | 56,21 | Inovatif |
| 132. | Kabupaten Cirebon | 56,16 | Inovatif |
| 133. | Kabupaten Aceh Tamiang | 56,08 | Inovatif |
| 134. | Kabupaten Jeneponto | 55,74 | Inovatif |
| 135. | Kabupaten Aceh Barat | 55,64 | Inovatif |
| 136. | Kabupaten Maluku Tengah | 55,60 | Inovatif |
| 137. | Kabupaten Ciamis | 55,56 | Inovatif |
| 138. | Kabupaten Halmahera Timur | 55,46 | Inovatif |
| 139. | Kabupaten Batang | 55,32 | Inovatif |
| 140. | Kabupaten Agam | 55,23 | Inovatif |
| 141. | Kabupaten Badung | 55,15 | Inovatif |

Adapun inovasi yang diusulkan untuk IGA Award adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan pada IGA Award

| NO | PELAKSANA INOVASI DAERAH | INOVASI DAERAH | KETERANGAN (DESKRIPSI) |
|----|--|--|--|
| 1 | Kecamatan Dusun Hilir | SISTEM INFORMASI ANDALAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN DUSUN HILIR (SIAPP KEDUNHIL) | Memberikan pelayanan publik yang prima merupakan tujuan setiap pemerintah daerah. Untuk mewujudkannya, pemerintah daerah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan (good governance). |
| 2 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan | SUPER ENAK (SatU PERmohonan dapat ENAm doKumen / Layanan Dokumen 6 in 1) | Inovasi SUPER ENAK (SatU PERmohonan dapat ENAm doKumen) merupakan layanan 6 in 1 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang mempermudah dan mempercepat pengurusan administrasi kependudukan. Melalui satu kali pengajuan Akta Perkawinan bagi pasangan non muslim, pemohon langsung memperoleh enam dokumen sekaligus, yaitu: Akta Perkawinan, Kartu Keluarga baru, perubahan KTP elektronik suami dan istri (status kawin), serta perubahan Kartu Keluarga orang tua masing-masing. Layanan ini memberikan kemudahan, efisiensi waktu, dan penghematan biaya bagi masyarakat. |
| 3 | Dinas Perhubungan | Pemberian Subsidi Angkutan Darat dan Sungai Dalam Rangka Menanggulangi Inflasi (PESTUNA) | Pemberian Subsidi Tarif Penumpang Angkutan Sungai dan Darat di Kabupaten Barito Selatan merupakan langkah pemerintah daerah untuk menekan inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak pada sektor transportasi tahun 2022. Melalui subsidi ini, beban biaya transportasi masyarakat dapat dikurangi sehingga dampak kenaikan harga dan tekanan inflasi dapat dikendalikan. Program ini dilaksanakan dengan dukungan pagu dana, penyaluran subsidi selama Oktober–Desember 2022, serta pengawasan dan dokumentasi penyaluran kepada pelaku transportasi. Inovasi ini membantu menjaga stabilitas harga sekaligus meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transportasi dasar. |

| | | | |
|---|--|--|---|
| 4 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Majakan Lewu (MALEWU) | <p>Pelayanan publik yang inklusif masih menjadi tantangan di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Inovasi Malewu “Maja Kan Lewu” hadir dengan pendekatan <i>jemput bola</i>, yaitu menghadirkan layanan langsung ke masyarakat untuk mempercepat akses dan meningkatkan kualitas pelayanan. Program ini bertujuan mempermudah kepemilikan dokumen legal seperti NIB, PBG, izin sektor kesehatan, pariwisata, dan perizinan usaha lainnya, sekaligus meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Layanan mencakup perizinan berusaha, sektor kesehatan, PUPR, dan perhubungan, dengan sasaran masyarakat kecamatan dan desa, lansia, penyandang disabilitas, serta UMKM. Pelaksanaan dilakukan melalui survei wilayah, penjadwalan, mobilisasi tim, pelayanan langsung di lokasi, serta evaluasi dan tindak lanjut. Dengan dukungan SDM, sarana prasarana, anggaran, dan sistem digital, program ini diharapkan mampu meningkatkan cakupan dokumen legal, menurunkan keluhan layanan, meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat, serta mewujudkan pelayanan publik yang merata, adaptif, dan responsif.</p> |
| 5 | Kecamatan Dusun Hilir | Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (SimPATEN) | <p>Inovasi SimPATEN (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) merupakan layanan publik berbasis digital dari Pemerintah Kecamatan Dusun Hilir untuk mengatasi proses administrasi yang sebelumnya masih manual, lambat, dan kurang transparan. Melalui aplikasi terpadu ini, masyarakat dapat mengajukan berbagai layanan seperti surat keterangan, domisili, dan rekomendasi secara lebih cepat dan efisien. SimPATEN didukung oleh ADM (Anjungan Data Mandiri) di kantor kecamatan, yang memungkinkan pemohon melakukan registrasi, memilih layanan, dan mengunggah persyaratan secara mandiri, sementara petugas tetap melakukan verifikasi di sistem. Inovasi ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan, sekaligus menjadi langkah transformasi digital untuk mewujudkan layanan yang</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | modern, mudah, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. |
| 6 | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | Sistem Informasi Data Statistik Sektoral Versi 2 (SIMDATIK V.2) | Pembangunan berkelanjutan memerlukan data yang akurat, mutakhir, konsisten, dan mudah diakses sebagai dasar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Data berintegritas tinggi—statistik, spasial, dan administratif—menjadi kunci pengambilan kebijakan yang tepat serta mendorong partisipasi masyarakat. Hal ini menuntut koordinasi yang kuat antar perangkat daerah dan lintas pemerintahan agar tercipta satu data yang terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika membangun aplikasi SIMDATIK V.2 (Sistem Informasi Data Statistik Sektoral) sebagai bank data statistik sektoral daerah. Aplikasi berbasis web ini mendukung konsep single data, memungkinkan setiap perangkat daerah menginput dan mengelola data sesuai kewenangan, yang kemudian terintegrasi dalam satu database pemerintah daerah. SIMDATIK V.2 dilengkapi fitur rekap otomatis, penyajian grafik dan tabel, serta unduhan multi format (PDF, Word, Excel), sehingga memudahkan penyusunan laporan dan infografis. Ke depan, sistem ini diharapkan terintegrasi dengan layanan Satu Data Indonesia dan dapat diakses luas oleh masyarakat. |

| | | | |
|---|----------------------|--|---|
| 7 | RSUD JARAGA SASAMEH | Optimalisasi Pelayanan Akupuntur Medik di Poliklinik UPT RSUD Jaraga Sasameh (PETAK JARSE) | <p>Pelayanan Akupuntur Medik merupakan terapi komplementer berbasis bukti yang efektif untuk mengatasi nyeri, gangguan saraf, stres, serta masalah hormonal dan imunitas. Terapi ini relatif aman dengan efek samping minimal dan telah diakui oleh World Health Organization sebagai bagian dari integrasi pengobatan tradisional dan medis konvensional. Sejak 2019, RSUD Jaraga Sasameh membuka Poliklinik Akupuntur, namun pelayanan sempat terhambat sejak pandemi COVID-19 akibat keterbatasan sarana, SDM terlatih, dan rendahnya pemahaman masyarakat. Melalui inovasi optimalisasi layanan, poliklinik ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi waktu, dan kepuasan pasien, serta menjadi model layanan komplementer yang terintegrasi, efektif, dan berorientasi mutu.</p> |
| 8 | SMPN-5 DUSUN SELATAN | Bela Negara Dengan Pembelajaran Prakarya Siswa Tematik (BENANG JAWET) | <p>BENANG JAWET (Bela Negara dengan Pembelajaran Siswa Tematik) merupakan inovasi pembelajaran yang mengintegrasikan nilai Bela Negara ke dalam mata pelajaran Prakarya melalui pendekatan tematik dan berbasis proyek. Program ini mengajak siswa membuat karya kreatif dari bahan lokal seperti rotan dan sampah kering, sekaligus menanamkan nilai cinta tanah air, disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan kepedulian lingkungan. Selain melestarikan kerajinan tradisional, kegiatan ini juga mendorong pemanfaatan bahan daur ulang sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa dan lingkungan. Melalui pembelajaran yang kontekstual dan bermakna, BENANG JAWET tidak hanya menghasilkan produk kreatif, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan hidup, dan semangat kebangsaan siswa secara holistik.</p> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan | SUPER PATEN (SatU PERmohonan daPAAt Tiga dokumEN / Layanan Dokumen 3 in 1) | <p>SUPER PATEN (SatU PERmohonan daPAAt Tiga dokumEN) atau layanan 3 in 1 merupakan inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan administrasi kependudukan. Melalui satu kali pengajuan Akta Kelahiran, masyarakat langsung memperoleh tiga dokumen sekaligus, yaitu Kartu Keluarga (KK) perubahan dengan penambahan anak, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA). Layanan ini mengintegrasikan proses Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam satu pintu tanpa perlu melengkapi berkas berulang. Inovasi ini meningkatkan efisiensi waktu dan proses pelayanan, memudahkan masyarakat, serta mendukung program nasional peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> |
| 10 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | LOMBA GAPURA DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN | <p>Gapura telah lama menjadi bagian dari budaya Indonesia, salah satunya terlihat pada Gapura Bajang Ratu peninggalan Kerajaan Majapahit abad ke-14. Secara filosofi, gapura melambangkan gerbang menuju harapan, kemakmuran, dan identitas suatu daerah, bahkan kini menjadi ikon dan simbol kebanggaan, termasuk sebagai penanda destinasi wisata. Dalam rangka HUT RI, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menggelar lomba gapura di lingkungan perangkat daerah dan permukiman warga. Inovasi ini bertujuan menumbuhkan semangat kebangsaan, memperkuat identitas nasional, serta menghargai sejarah perjuangan bangsa. Lomba gapura mendorong kreativitas dan inovasi desain berbasis budaya lokal, meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai sejarah, serta menghasilkan gapura unik yang menjadi ikon perayaan dan kebanggaan daerah.</p> |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 11 | Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Barito Selatan | Bahan Pokok Penting (BAPOKTING) | Pemantauan harga sembako dan LPG bersubsidi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Harga sembako—seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging, ikan, bawang, dan cabai—mempengaruhi inflasi, daya beli, dan kestabilan sosial. Pemantauan rutin melalui survei pasar dan teknologi memungkinkan pemerintah mengambil kebijakan tepat, seperti subsidi atau intervensi harga, sehingga kebutuhan pokok tetap terjangkau. Pemantauan LPG bersubsidi bertujuan memastikan distribusi tepat sasaran, mencegah penyalahgunaan, dan mengurangi kerugian fiskal. Langkahnya meliputi sistem pendataan akurat, pelacakan distribusi, penggunaan teknologi real-time, edukasi masyarakat, serta audit dan penindakan terhadap penyalahgunaan. Secara keseluruhan, kedua pemantauan ini mendukung ketersediaan pangan dan energi yang stabil, efisien, dan tepat sasaran bagi masyarakat. |
| 12 | Dinas Pendidikan | Smart Presensi | Inovasi Smart Presensi adalah sistem pencatatan kehadiran berbasis teknologi yang mempermudah proses presensi di kantor, sekolah, atau acara. Sistem ini menggunakan sensor, perangkat mobile, dan jaringan komputer untuk mencatat kehadiran secara otomatis. Fitur utamanya meliputi: identifikasi otomatis lewat wajah atau sidik jari, presensi via aplikasi mobile dengan GPS, pelacakan real-time, laporan presensi otomatis, serta integrasi dengan sistem manajemen karyawan atau akademik. Keunggulannya adalah meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan data, sekaligus mengurangi kesalahan dan menghemat waktu administrasi. |
| 13 | Nurul Majidah, S.Pd.I., M.Pd | Continuos and Relevant Religious Programs (CRAP) | Pendidikan agama memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Di era modern, tantangan terhadap nilai-nilai moral dan spiritual semakin besar. Oleh karena itu, sekolah perlu menyelenggarakan program keagamaan yang terencana dan berkelanjutan guna memperkuat nilai-nilai keislaman sejak usia dini. |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 14 | Karunia Ardhi Trisnanto, S.IP., M.AP | Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Penanganan Stunting di Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan | <p>Stunting merupakan tantangan serius dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensinya masih cukup tinggi, terutama di daerah dengan keterbatasan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi, termasuk di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menetapkan penurunan stunting sebagai prioritas nasional dalam RPJMN 2020–2024 melalui pendekatan holistik dan integratif, seperti intervensi gizi, peningkatan sanitasi dan air bersih, serta penguatan posyandu dan kader kesehatan. Sejalan dengan itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya pembangunan manusia melalui pemenuhan gizi seimbang, penguatan ketahanan keluarga, dan pemberdayaan masyarakat. Kelurahan Buntok Kota di Kecamatan Dusun Selatan memiliki potensi besar dalam penerapan pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk penanganan stunting melalui keterlibatan tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan PKK. Oleh karena itu, optimalisasi pemberdayaan masyarakat menjadi strategi penting untuk menurunkan angka stunting dan mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.</p> |
|----|---|---|--|

| | | | |
|----|-------------------|--|--|
| 15 | SRI HARTATI, M.Pd | Bimbingan Menulis Siswa Dengan Gambar Tematik Berpola (BILIS BARITO) | Menulis merupakan kegiatan menyampaikan gagasan atau informasi secara tertulis menggunakan bahasa tulis. Namun, banyak siswa lebih menyukai aktivitas visual dibandingkan menulis karena kurangnya motivasi, keterampilan, dukungan lingkungan, serta rasa kurang percaya diri dalam menulis. Penggunaan gambar tematik dan berpola dapat menjadi solusi untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan menulis. Melalui gambar dengan tema tertentu seperti lingkungan, keluarga, tumbuhan, atau bencana alam, siswa lebih mudah menuangkan ide menjadi kata, kalimat, dan paragraf yang tersusun dengan baik. Bimbingan menulis sangat penting untuk membantu siswa menganalisis dan mengembangkan ide tulisan. Dengan bantuan gambar tematik, siswa lebih mudah memahami konsep, mengembangkan imajinasi, serta mengungkapkan gagasan secara tertulis. Hal ini juga dapat meningkatkan motivasi belajar, keterampilan berbahasa, dan kemampuan berpikir kritis. Melalui proses ini, siswa tidak hanya mampu menulis cerita naratif, tetapi juga menyampaikan hasil tulisannya melalui kegiatan public speaking di depan teman-temannya. |
|----|-------------------|--|--|

| | | | |
|----|-----------------|---|--|
| 16 | Wunge Mawariati | Best Practices Sabtu Bahagia Mewujudkan Sekolah Hebat Karakter Kuat | <p>SMP Negeri 1 Dusun Utara berdiri sejak tahun 1988 dan telah mengalami berbagai perubahan, baik dari segi bangunan, kurikulum, maupun kegiatan sekolah. Namun sebelum tahun 2021, kondisi pengelolaan sekolah masih kurang optimal meskipun telah menerima bantuan sarana dan prasarana. Sejak Februari 2021, inovator mulai melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan sekolah sebagai langkah awal perbaikan. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dilakukan untuk menjawab tantangan perubahan zaman, terutama setelah pandemi Covid-19 yang mendorong pelaksanaan pembelajaran daring selama hampir dua tahun. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai kendala, seperti keterbatasan akses teknologi dan kesulitan menilai kompetensi peserta didik. Melalui kebijakan Merdeka Belajar, SMP Negeri 1 Dusun Utara menghadirkan program “Sabtu Bahagia” untuk memperkuat karakter peserta didik melalui Profil Pelajar Pancasila. Program ini sejalan dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan pembentukan Pelajar Pancasila.</p> |
| 17 | TERNATE | PENGHANGAT AYAM BROILER TANPA LISTRIK | <p>Daging ayam merupakan salah satu sumber protein hewani yang paling populer karena harganya terjangkau, mudah diolah, dan disukai berbagai kalangan. Di Indonesia, ayam memiliki peran penting dalam kuliner tradisional maupun modern serta menjadi komoditas pangan utama. Konsumsi daging ayam di Indonesia terus meningkat, dari sekitar 11 kg per kapita per tahun pada 2019 menjadi sekitar 12,7 kg pada 2022. Peningkatan ini dipengaruhi oleh harga yang lebih murah dibanding daging sapi, kemudahan akses di pasar, serta berkembangnya usaha kuliner berbasis ayam seperti ayam geprek dan ayam goreng crispy. Sebagian besar pasar daging ayam di Indonesia didominasi oleh ayam broiler (lebih dari 90%), sedangkan sisanya berasal dari ayam kampung dan ayam organik.</p> |

| | | | |
|----|-------------------------------|--|--|
| 18 | THERESIA NOVITA, S.P., M.E | PEMANFAATAN LIMBAH CANGKANG TELUR SEBAGAI PUPUK ORGANIK DAN BIOPESTISIDA | <p>Seiring perkembangan industri makanan di Indonesia, limbah yang dihasilkan juga semakin meningkat, salah satunya limbah cangkang telur. Limbah ini banyak berasal dari industri, UMKM, maupun rumah tangga dan seringkali dibuang karena dianggap tidak berguna. Padahal, cangkang telur memiliki kandungan kalsium, fosfor, dan mineral lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman serta dapat membantu melindungi tanaman dari hama. Cangkang telur mengandung sekitar 97% kalsium karbonat serta mineral lain seperti magnesium, natrium, kalium, seng, mangan, besi, dan tembaga. Kandungan kalsium tersebut berperan penting dalam memperkuat dinding sel tanaman, membantu pertumbuhan akar, serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. Pemanfaatan cangkang telur dapat dilakukan dengan mengolahnya menjadi pupuk organik cair dan pestisida alami. Prosesnya meliputi pembersihan, pengeringan, penyangraian, dan penumbukan cangkang telur hingga halus, kemudian dicampur dengan bahan seperti gula merah, EM4, air, dan cabai giling sebelum difermentasi. Penggunaan pupuk organik dan pestisida dari cangkang telur menjadi alternatif pengolahan limbah yang murah, mudah dibuat, ramah lingkungan, serta mampu meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman.</p> |
|----|-------------------------------|--|--|

| | | | |
|----|----------------|--|--|
| 19 | Ethin Kristin | Pupuk Organik Cair Dari Limbah Nenas Parigi (POC LINAGI) | <p>Pupuk merupakan nutrisi penting bagi tanaman untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi. Namun, penggunaan pupuk nitrogen (N) pada budidaya padi sering tidak efisien karena tanaman hanya menyerap sekitar 30–50% akibat pencucian dan penguapan. Selain itu, penggunaan pupuk anorganik secara intensif dapat mengurangi bahan organik tanah dan menurunkan kesuburan tanah. Oleh karena itu, penggunaan pupuk organik atau pupuk hayati yang mengandung mikroba sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pemupukan serta kesehatan tanah. Tantangan peningkatan produksi padi dan jagung juga dipengaruhi oleh perubahan iklim, seperti El Nino, yang berpotensi menyebabkan gagal panen. Untuk mengatasinya diperlukan upaya terintegrasi melalui penerapan teknologi, kearifan lokal, dan penyuluhan pertanian kepada petani. Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah Pupuk Organik Cair dari Limbah Nenas Parigi (POC LINAGI). Pupuk ini berfungsi sebagai pupuk hayati yang membantu menyuplai unsur hara dengan cepat, memperbaiki kesuburan tanah, serta mendukung budidaya padi yang ramah lingkungan. Penggunaan POC LINAGI diharapkan dapat meningkatkan produktivitas padi sekaligus menjaga keberlanjutan lahan pertanian.</p> |
| 20 | David Hermawan | Personal Hygiene dalam Morning Circle (Perimoci) | <p>Kebersihan tubuh dan kerapian seragam di lingkungan sekolah merupakan aspek penting yang mendukung kesehatan dan kenyamanan siswa. Praktik Personal Hygiene merupakan suatu istilah untuk kegiatan kebersihan tubuh dan kerapian seragam tersebut. Kesadaran akan Personal Hygiene akan menjadi bekal siswa sebagai makhluk sosial yang luhur ketika mereka Kembali nanti ke Masyarakat.</p> |

| | | | |
|----|--------------------|--|---|
| 21 | Ratna Ningsih, SP | Optimalisasi Sistem Informasi Layanan Pajak Daerah Berbasis Aplikasi SIMPATDA E-Payment di BPKAD Kab. Barito Selatan | <p>Pelayanan pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Selatan untuk PBB-P2 dan BPHTB telah menggunakan sistem SISMIOP yang terintegrasi dengan Bank Kalteng, BRI, Mandiri, dan Kantor Pos. Selain itu, pelayanan BPHTB juga didukung aplikasi E-BPHTB yang terintegrasi dengan PPAT, BPN, dan KPKNL Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, pelayanan pajak daerah lainnya yang bersifat self assessment seperti pajak sarang burung walet, hotel, dan restoran masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, direncanakan peningkatan pelayanan melalui Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA) yang terintegrasi dengan bank serta dilengkapi fitur E-Payment. Sistem ini memungkinkan pembayaran pajak daerah, termasuk PBB-P2 dan BPHTB, dilakukan melalui berbagai kanal seperti bank, Indomaret, dan Alfamart sehingga memudahkan wajib pajak. Inovasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan layanan pajak sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Selatan.</p> |
| 22 | HAWINU, ST., M.Eng | Peningkatan Kompetensi Konstruksi Bangunan Sipil Sederhana Desa (MANUWU) | <p>Pembangunan desa berfokus pada peningkatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola pembangunan wilayahnya melalui swakelola, gotong royong masyarakat, maupun padat karya dengan pembiayaan dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan sumber lainnya. Namun, masih terdapat pembangunan infrastruktur desa yang belum memenuhi standar kualitas akibat keterbatasan pengetahuan aparat desa dan tenaga kerja konstruksi. Kondisi ini dapat menyebabkan pelaksanaan pembangunan kurang efektif, tidak efisien, bahkan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Sesuai amanat PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Jasa Konstruksi, Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan melalui Bidang Bina Jasa Konstruksi memiliki kewajiban melakukan pembinaan</p> |

| | | | |
|----|------------------------|--|---|
| | | | <p>dan pengawasan terhadap kegiatan konstruksi, termasuk yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sebagai upaya peningkatan kualitas pembangunan desa, Dinas PUPR menghadirkan inovasi MANUWU (Mantap, Aman, Nyaman, akuntabel, swadaya, berkelanjutan) yang bertujuan meningkatkan kompetensi aparat desa dan tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan bangunan sipil sederhana. Dalam bahasa Dayak Maanyan, “Manuwu” berarti karya yang bagus atau indah.</p> |
| 23 | SALIMENI S., S.P., M.P | RAMUAN AMPUH ANTI TIKUS SAWAH (RAPUAN TIWAH) | <p>Hama tikus merupakan salah satu hama utama pada tanaman padi yang sulit dikendalikan karena menyerang sejak masa persemaian hingga menjelang panen. Serangan tikus dapat menyebabkan kerusakan besar pada tanaman bahkan berpotensi menimbulkan gagal panen. Di Kecamatan Dusun Selatan, pengendalian hama tikus masih banyak mengandalkan pestisida kimia yang memerlukan biaya cukup besar bagi petani. Oleh karena itu, Tim KJF Penyuluh Pertanian Kabupaten Barito Selatan berupaya mencari metode pengendalian tikus yang lebih murah, mudah, dan efektif untuk membantu petani mengatasi masalah tersebut.</p> |

| | | | |
|----|------------------------|---|---|
| 24 | SALIMENI S., S.P., M.P | PENGENDALIAN KUTU PUTIH MENGGUNAKAN DAUN MIMBA (LIKUT MANDAMBA) | Cabai merah merupakan komoditas pertanian penting karena memiliki nilai ekonomi tinggi, menjadi komoditas unggulan nasional dan daerah, serta banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Selain itu, harga cabai sering berfluktuasi dan dapat mempengaruhi inflasi. Namun, keberhasilan budidaya cabai sering terganggu oleh serangan hama yang dapat menurunkan produksi bahkan menyebabkan gagal panen. Salah satu hama utama pada tanaman cabai rawit di Barito Selatan adalah kutu putih (<i>Bemisia tabaci</i>). |
| 25 | SALIMENI S., S.P., M.P | PENGENDALIAN KUTU PUTIH DENGAN DAUN SIRSAK (LIKUT BADASAK) | Cabai merah merupakan komoditas unggulan dengan nilai ekonomi tinggi dan dikonsumsi hampir setiap hari di Indonesia, meski dalam jumlah kecil. Harga cabai yang fluktuatif juga berpengaruh pada inflasi. Budidaya cabai rawit sering terganggu oleh hama, yang dapat menurunkan produktivitas bahkan menyebabkan gagal panen. Salah satu hama utama adalah kutu putih (<i>Bemisia tabaci</i>). |
| 26 | SALIMENI S.,S.P., M.P | LAYANAN KONSULTASI PETANI DAN PENYULUH (LAKU TALUH) | Salah satu pendekatan dalam penyuluhan pertanian adalah dengan menggunakan Sistem Kerja "Latihan dan Kunjungan" (LAKU). Sistem Kerja LAKU yaitu pendekatan penyuluhan yang memadukan antara pelatihan bagi penyuluh sebagai upaya peningkatan kemampuan penyuluh dalam melaksanakan tugasnya, yang ditindaklanjuti dengan kunjungan kepada petani/keompok tani yang dilakukan secara terjadwal. |

| | | | |
|----|--------------------|--|---|
| 27 | SWITA MINARSIH, SE | WATAKAM (Wirausaha Tangguh Kompetitif dan Mandiri) | <p>UMKM merupakan salah satu usaha pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam membantu perekonomian di Indonesia, UMKM juga sangat berkontribusi dalam mengatasi masalah pengangguran termasuk salah satunya di Kabupaten Barito Selatan saat ini. Masalah Utama yang Perlu ditangani adalah Kompetensi Tenaga Pengelola Pendamping UMKM masih rendah, Sebagian Besar UMKM Belum memiliki legalitas usaha dan melakukan registrasi Usaha, Standarisasi Produk, Akses Pemasaran dan Kemitraan UMKM , Belum adanya Petunjuk Teknis terkait Standar Operasional Pelayanan Pendampingan UMKM. Wirausaha Tangguh Kompetitif dan Mandiri (WATAKAM) Adalah program Layanan melalui sosialisasi dan pendampingan untuk mewujudkan UMKM Unggul di Kabupaten Barito Selatan, merupakan suatu konsep terobosan yang berani dan relevant, konsep yang cekatan dalam pelaksanaannya dan cepat merespon tuntutan dan perubahan lingkungan strategis, mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Barito Selatan secara khusus maupun Kalimantan Tengah secara umum, sekaligus meningkatkan pelayanan pendampingan bagi pelaku UMKM melalui inovasi-inovasi modern dan partisipatif, dalam memberikan layanan pendampingan untuk UMKM yang Akurat, Pasti, Sederhana dan Transparansi. Program ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan UMKM yang ada di Kabupaten Barito Selatan, Di dasari atas Belum tersedianya Manajemen pengelola Layanan Pendampingan UMKM dan Belum Tersedianya Sistem Operasional Monitoring dan Evaluasi Layanan Pendampingan Serta belum Berkembangnya Akses Jaringan usaha pemasaran dan kemitraan Usaha Mikro. Oleh karena itu, program ini akan menjawab bagaimana mengoptimalkan</p> |
|----|--------------------|--|---|

| | | | |
|----|----------------------------------|--|--|
| | | | <p>pengelolaan layanan pendampingan UMKM yang merata Diseluruh Kabupaten Barito Selatan. Kondisi yang diharapkan dari program Layanan melalui sosialisasi dan pendampingan WATAKAM adalah Meningkatkan Pelayanan Pendampingan UMKM, Mewujudkan layanan pendampingan, Manajemen Pengelola Layanan Pendampingan UMKM di Kabupaten yang menangani pelaksanaan Sistem Operasional, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pendampingan UMKM dan akses Jaringan Usaha Pemasaran dan Kemitraan UMKM di Kabupaten Barito selatan</p> <p>Optimalisasi pengelolaan Layanan Pendampingan melalui Strategi WATAKAM. Ditujukan untuk Meningkatkan pelayanan pendampingan UMKM yang dapat menjawab kebutuhan UMKM akan ketersediaan Layanan Pedampingan yang lebih baik dari segi pelayanan akurat, Kepastian, Kesederhanaan dan Transparansi oleh seluruh lapisan UMKM dengan Layanan Pendampingan WATAKAM dalam Mewujudkan UMKM Unggul dan Naik Kelas.</p> |
| 28 | EVI KUSUMAWARDHANI, S.STP, .M.IP | INOVASI PERCEPATAN PENGAJUAN PENCAIRAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA (CUAN DESA) | <p>Kecamatan Dusun Selatan terdiri dari 24 desa dan 3 kelurahan di tengah Kota Buntok. Setiap tahun, pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan ini cenderung lambat, meski pada tahun 2024 semua desa sudah mengajukan pencairan Tahap I sebelum batas waktu yang ditetapkan. Beberapa faktor penyebab keterlambatan antara lain: keterlambatan penyusunan APBDes, administrasi SPJ yang tidak lengkap atau salah, kurangnya pemahaman aparat desa terkait prosedur pencairan, kendala teknis pada sistem keuangan desa (Siskeudes), serta adanya dugaan penyimpangan atau sisa dana tahun sebelumnya yang harus diaudit. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas pengelolaan dana, mempercepat penyusunan APBDes, dan menjalin koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah serta pendamping desa.</p> |

| | | | |
|----|--------------------------------------|---|---|
| 29 | HELFANSYAH, S.A.P., M.M | PELAYANAN ADMINISTRASI PUBLIK DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER (PERIUK ANTIK) | Pelayanan administrasi publik kini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan kualitas layanan. Dengan aplikasi online, masyarakat dapat mengurus perizinan atau membayar pajak lebih cepat tanpa harus datang ke kantor pemerintah, sekaligus meminimalkan praktik pungutan liar dan kesalahan administrasi. Di era globalisasi, tuntutan pelayanan publik semakin kompleks, sehingga aparatur pemerintah perlu bekerja lebih profesional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kelurahan Hilir Sper sebagai ujung tombak pelayanan publik dituntut meningkatkan responsivitas dan efisiensi layanan sesuai SPBE (Perpres No. 95 Tahun 2018) dan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. |
| 30 | Wunge Mawariati | Buku Cerita Dwibahasa | Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai anak melalui interaksi keluarga dan masyarakat, biasanya berupa bahasa daerah. Contohnya, anak yang lahir di Kalimantan Tengah dari orang tua berbahasa Dayak Ngaju, bahasa ibunya adalah Dayak Ngaju. Orangtua perlu mengajarkan bahasa daerah sejak dini agar anak bangga dengan asal-usulnya, sambil mendesain pembelajaran yang menyenangkan, misalnya melalui buku literasi untuk usia 4–6 tahun. |
| 31 | Salimeni S., S.P dan Yayanto, S.P | Eksplorasi dan Perbanyakan Trichoderma si Pengendali Jamur Penyebab Tanaman Sakit | Ketergantungan pada bahan kimia dalam budidaya tanaman berdampak negatif bagi konsumen, sehingga dibutuhkan alternatif pangan aman. Trichoderma spp, jamur tanah yang berfungsi sebagai pupuk biologis dan agens pengendali hayati, menjadi solusi alami untuk mengendalikan pathogen tanaman. Meski Trichoderma sudah dijual di pasaran, kualitas dan harga masih menjadi kendala. Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan bekerja sama dengan petani untuk mengeksplorasi dan memperbanyak Trichoderma dari bahan lokal seperti akar dan daun bambu. Jamur ini diperbanyak menggunakan media nasi, potato dextrose agar (PDA), atau beras kukus untuk skala rumah tangga. Trichoderma hasil eksplorasi dapat |

| | | | |
|----|-----------------|--|--|
| | | | digunakan untuk mengendalikan pathogen, atau dicampur dengan pupuk organik menjadi trikokompos, media tanam yang baik untuk sayuran maupun padi. |
| 32 | Salimeni. S, SP | Budidaya Bawang Merah di Tanah Pasir Bergambut di Desa Telang Andrau | Bawang merah memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat dibudidayakan di berbagai ketinggian, dengan konsumsi masyarakat Indonesia sekitar 725 ton/tahun dan meningkat 5% tiap tahun. Namun, luas lahan yang berkurang dan perubahan iklim ekstrem membuat harga bawang merah sering tinggi. Di Desa Telang Andrau, budidaya bawang merah masih baru bagi masyarakat. Untuk itu, dilakukan uji coba dan Demonstrasi Plot bersama kelompok tani dan Wanita Tani (KWT) Melati, memperkenalkan teknik budidaya spesifik lokasi. Kegiatan ini diharapkan meningkatkan penghasilan rumah tangga petani dan, jika dikembangkan skala besar, turut membantu menurunkan inflasi bawang merah di daerah. |

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Indikator Kinerja | : Persentase Kebijakan Berbasis Bukti |
| Target | : 71% |
| Realisasi Kinerja | : 100% (14 kajian) |

Capaian indikator *Persentase Kebijakan Berbasis Bukti* pada tahun berjalan mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh kebijakan yang dirumuskan telah disusun berdasarkan data, informasi, serta hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan teknokratis. Penyusunan kebijakan tersebut mengacu pada berbagai sumber evidence, antara lain hasil analisis data pembangunan daerah, kajian sektoral, hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan, serta sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan provinsi. Capaian ini juga didukung

oleh penguatan proses perencanaan yang partisipatif dan berbasis data, melalui pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan, hasil forum koordinasi lintas perangkat daerah, serta penggunaan sistem informasi perencanaan yang menyediakan data dan indikator pembangunan secara terukur. Dengan demikian, setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah, tetapi juga didasarkan pada analisis evidence yang komprehensif.

Keberhasilan pencapaian indikator ini mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas perumusan kebijakan yang lebih akuntabel, terukur, dan berorientasi pada hasil, sehingga diharapkan mampu mendukung efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Kajian yang telah dilakukan telah diimplementasikan di daerah sebagai langkah nyata dalam menerapkan rekomendasi yang dihasilkan. Implementasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kebijakan daerah, program kerja, hingga tindakan langsung yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan pihak terkait. Dalam pelaksanaannya, hasil kajian dijadikan sebagai pedoman untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan daerah, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian permasalahan lokal. Selain itu, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa implementasi berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan adanya penerapan hasil kajian di daerah, diharapkan mampu menciptakan solusi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Ada 14 (empat belas) kajian yang terimplementasi dalam program rencana kerja perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Kajian yang terimplementasi

| NO | JUDUL KAJIAN | PERANGKAT DAERAH | MITRA KERJASAMA |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Wilayah; Studi Kasus Kabupaten Barito Selatan | Dinas Sosial | UNIVERSITAS GADJAH MADA |
| 2 | Pendidikan dan Kebudayaan yang Inklusif dan Inovatif untuk daya daerah untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan peserta didik di era digital | Dinas Pendidikan | STIEPAN BANJARMASIN |

| | | | |
|----|--|--------------------------------|-------------------------------|
| 3 | Pengembangan ekonomi masyarakat melalui pariwisata berkelanjutan di kabupaten barito selatan provinsi kalimantan tengah | Dinas Pariwisata | STIEPAN BANJARMASIN |
| 4 | Scoping Study Penurunan Stunting di Kabupaten Barito Selatan; Kondisi Terkini, Determinan, dan Arah Strategi | Dinas Kesehatan | UNIVERSITAS GADJAH MADA |
| 5 | Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PJK) Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 | BKKBN | UNIVERSITAS PALANGKARAYA |
| 6 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Dinas Koperasi dan Perdagangan | UNIVERSITAS PALANGKARAYA |
| 7 | Analisis dan Strategi Pengembangan Industri Kerajinan dari Rotan di kabupaten di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah | Dinas Koperasi dan Perdagangan | STIEPAN BANJARMASIN |
| 8 | Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah | PDAM | UNIVERSITAS PALANGKARAYA |
| 9 | Pemetaan Potensi Wilayah dan Sosial Ekonomi Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah | Dinas Pertanian | UNIVERSITAS GADJAH MADA |
| 10 | Pengembangan Ikan Lokal dalam Rangka Mendukung Kelestarian Sumber Daya Perairan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 | Dinas Perikanan | UNIVERSITAS PALANGKARAYA |
| 11 | Memperkuat Tata Kelola Energi dan Sumber Daya Minerla Kabupaten Barito Selatan yang Inklusif dan Berkelanjutan, dalam Mendukung Peran Kawasan Penyangga Energi IKN | Sekretariat Daerah | UNIVERSITAS GADJAH MADA |
| 12 | Kajian Model Pengelolaan Lingkungan Hidup Terintegrasi untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Kabupaten Barito Selatan | Dinas Lingkungan Hidup | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT |

| | | | |
|----|--|------------------------------------|-------------------------------|
| 13 | Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Barito Selatan | BAPPERIDA Bidang Riset dan Inovasi | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT |
| 14 | Kajian Akademik Penyediaan Perumahan Terjangkau Berbasis Ekosistem Lokal; Strategi Pencegahan dan Pengentasan Permukiman Kumuh di Barito Selatan | Dinas Perumahan dan Pemukiman | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT |

Gambar 3. 1 Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Penyusunan Kajian Daerah

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Jalan Pahlawan Km. 06 Buntok, Dusun Selatan, Barito Selatan, Kalimantan Tengah 73711
Telp. (0525) 21015 Faksimile (0525) 21504
Laman www.opd.baritoselatankab.go.id, Pos-el : bappeda@baritoselatankab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor : 000.9.3/ 43 /Rida-Bapp/I/2026

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : JAYA WARDANA AP, S.E.,M.Ec.Dev
NIP : 19740702 199403 1 011
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : SYAHDANI, S.Pd
NIP : 19740601 199903 1 022
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dokumen hasil penyusunan kajian daerah dengan judul "strategi penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah; Studi kasus Kabupaten Barito Selatan" kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya kajian daerah ini dapat diimplementasikan dan diintegrasikan serta diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dimasa yang akan datang.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani Bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK PERTAMA,
JAYA WARDANA AP, S.E.,M.Ec.Dev
NIP. 19740702 199403 1 011


PIHAK KEDUA,
SYAHDANI, S.Pd
NIP. 19740601 199903 1 022



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Pahlawan Km. 06 Buntok, Dusun Selatan, Barito Selatan, Kalimantan Tengah 73711

Telp. (0525) 21015 Faksimile (0525) 21504

Laman www.opd.baritoselatankab.go.id, Pos-el : bappeda@baritoselatankab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 000.9.3/ 33 /Rida-Bapp/I/2026

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam. Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : JAYA WARDANA AP, S.E.,M.Ec.Dev
NIP : 19740702 199403 1 011
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : HARMITO, S.Pd.,M.M.
NIP : 19700201 199303 1 019
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dokumen hasil penyusunan kajian daerah dengan judul "Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah" kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya kajian daerah ini dapat diimplementasikan dan diintegrasikan serta diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dimasa yang akan datang.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani Bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA.

JAYA WARDANA AP, S.E.,M.Ec.Dev
NIP. 19740702 199403 1 011

PIHAK KEDUA,

HARMITO, S.Pd.,M.M.
NIP. 19700201 199303 1 019



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Pahlawan Km. 06 Buntok, Dusun Selatan, Barito Selatan, Kalimantan Tengah 73711

Telp. (0525) 21015 Faksimile (0525) 21504

Laman www.upd.barito.selatankab.go.id, Pos-el : bappeda@barito.selatankab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 000.9.3/37 /Rida-Bapp/I/2026

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : JAYA WARDANA AP, S.E.,M.Ec.Dev
NIP : 19740702 199403 1 011
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : HELFANSYAH, S.A.P., M.M.
NIP : 19821206 200604 1 019
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dokumen hasil penyusunan kajian daerah dengan judul "Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Barito Selatan" kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya kajian daerah ini dapat diimplementasikan dan diintegrasikan serta diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dimasa yang akan datang.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani Bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,


JAYA WARDANA AP, S.E.,M.Ec.Dev
NIP. 19740702 199403 1 011

PIHAK KEDUA,


HELFANSYAH, S.A.P., M.M.
NIP. 19821206 200604 1 019



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Pahlawan Km. 06 Duntok, Dusun Gelotan, Barito Selatan, Kalimantan Tengah 72711
Telp. (0525) 21015 Faksimile (0525) 21504
Laman www.opd.baritoselatankab.go.id, Pos-el : bappeda@baritoselatankab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 000.9.3/ 38 /Rida-Bapp/1/2026

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : JAYA WARDANA AP, S.E.,M.Ec.Dev
NIP : 19740702 199403 1 011
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Ir. MUHAMMAD TAUFIK, ST.,MT.
NIP : 19840210 200604 1 017
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dokumen hasil penyusunan kajian daerah dengan judul "Kajian Akademik Penyediaan Perumahan Terjangkau Berbasis Ekosistem Lokal; Strategi Pencegahan dan Pengentasan Permukiman Kumuh di Barito Selatan" kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya kajian daerah ini dapat diimplementasikan dan diintegrasikan serta diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dimasa yang akan datang.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani Bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,


JAYA WARDANA AP, S.E.,M.Ec.Dev
NIP. 19740702 199403 1 011

PIHAK KEDUA,


Ir. MUHAMMAD TAUFIK, ST.,MT.
NIP. 19840210 200604 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Pahlawan Km. 06 Buntok, Dusun Selatan, Barito Selatan, Kalimantan Tengah 73711

Telp. (0525) 21015 Faksimile (0525) 21504

Laman www.kab.go.id, www.kab.go.id, bappeda@baritoselatankab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 000.9.3/ 42 /Rida-Bapp/1/2026

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : JAYA WARDANA AP, S.E.,M.Ec.Dev
NIP : 19740702 199403 1 011
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : MULYADI HARRY PERIN, S.E.
NIP : 19780107 200802 1 001
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dokumen hasil penyusunan kajian daerah dengan judul "Memperkuat Tata Kelola Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Barito Selatan yang Inklusif dan Berkelanjutan, dalam Mendukung Peran Kawasan Penyangga Energi IKN" kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya kajian daerah ini dapat diimplementasikan dan diintegrasikan serta diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dimasa yang akan datang.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani Bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,


JAYA WARDANA AP, S.E.,M.Ec.Dev
NIP. 19740702 199403 1 011

PIHAK KEDUA,


MULYADI HARRY PERIN, S.E.
NIP. 19780107 200802 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Pahlawan Km. 06 Buntok, Dusun Selatan, Barito Selatan, Kalimantan Tengah 73711

Telp. (0525) 21015 Faksimile (0525) 21504

Laman www.opd.baritoselatankab.go.id, Pos-el : bappeda@baritoselatankab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 000.9.3/ 44 /Rida-Bapp/I/2026

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : JAYA WARDANA AP, S.E.,M.Ec.Dev
NIP : 19740702 199403 1 011
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : HARMITO, S.Pd., M.M
NIP : 19700201 199303 1 019
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dokumen hasil penyusunan kajian daerah dengan judul "Analisis dan Strategi Pengembangan Industri Kerajinan dari Rotan di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah" kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya kajian daerah ini dapat diimplementasikan dan diintegrasikan serta diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dimasa yang akan datang.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani Bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,



JAYA WARDANA AP, S.E.,M.Ec.Dev
NIP. 19740702 199403 1 011

PIHAK KEDUA,



HARMITO, S.Pd., M.M
NIP. 19700201 199303 1 019



BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 000.9.3/ 35 /Rida-Bapp1/2026

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : JAYA WARDANA AP, S.E.,M.Ec.Dev
NIP : 19740702 199403 1 011
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : NYIMAS ARTINI, S.E., M.M.
NIP : 19770428 200502 2 004
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dokumen hasil penyusunan kajian daerah dengan judul "Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PJK) Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025" kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya kajian daerah ini dapat diimplementasikan dan diintegrasikan serta diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dimasa yang akan datang.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani Bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK PERTAMA,

JAYA WARDANA AP, S.E.,M.Ec.Dev
NIP. 19740702 199403 1 011


PIHAK KEDUA,

NYIMAS ARTINI, S.E., M.M.
NIP: 19770428 200502 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Pahlawan Km. 06 Buntok, Dusun Selatan, Barito Selatan, Kalimantan Tengah 73711

Telp. (0525) 21015 Faksimile (0525) 21504

Laman www.opd.baritoselatankab.go.id, Pos-el : bappeda@baritoselatankab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 000.9.3/46 /Rida-Bapp/I/2026

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : JAYA WARDANA AP, S.E.,M.Ec.Dev
NIP : 19740702 199403 1 011
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : RIPALTA, S.E., M.M
NIP : 19690411 200003 1 009
Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dokumen hasil penyusunan kajian daerah dengan judul "Pengembangan ekonomi masyarakat melalui pariwisata berkelanjutan di kabupaten barito selatan provinsi kalimantan Tengah" kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya kajian daerah ini dapat diimplementasikan dan diintegrasikan serta diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dimasa yang akan datang.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani Bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,


JAYA WARDANA AP, S.E.,M.Ec.Dev
NIP. 19740702 199403 1 011

PIHAK KEDUA,


RIPALTA, S.E., M.M
NIP. 19690411 200003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Pahlawan Km. 06 Buntok, Dusun Selatan, Barito Selatan, Kalimantan Tengah 73711

Telp. (0525) 21015 Faksimile (0525) 21504

Laman www.opd.baritoselatankab.go.id, Pos-el : bappeda@baritoselatankab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 000.9.3/ 40 /Rida-Bapp/I/2026

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : JAYA WARDANA AP, S.E.,M.Ec.Dev
NIP : 19740702 199403 1 011
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : IDA SAFITRI, S.P., M.M
NIP : 19720904 199803 2 008
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dokumen hasil penyusunan kajian daerah dengan judul "Pemetaan Potensi Wilayah dan Sosial Ekonomi Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah" kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya kajian daerah ini dapat diimplementasikan dan diintegrasikan serta diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dimasa yang akan datang.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani Bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

JAYA WARDANA AP, S.E.,M.Ec.Dev
NIP. 19740702 199403 1 011

PIHAK KEDUA,

IDA SAFITRI, S.P., M.M
NIP. 19720904 199803 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Pahlawan Km. 06 Buntok, Dusun Selatan, Barito Selatan, Kalimantan Tengah 73711

Telp. (0525) 21015 Faksimile (0525) 21604

Laman www.opd.baritoselatankab.go.id, Pos-el : bappeda@baritoselatankab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 000.9.3/ 41 /Rida-Bapp/I/2026

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : JAYA WARDANA AP, S.E.,M.Ec.Dev
NIP : 19740702 199403 1 011
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : dr. DADANG BASKORO NUGROHO, Sp.PD.
NIP : 19720209 200212 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dokumen hasil penyusunan kajian daerah dengan judul "Scoping Study Penurunan Stunting di Kabupaten Barito Selatan; Kondisi Terkini, Determinan, dan Arah Strategi" kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya kajian daerah ini dapat diimplementasikan dan diintegrasikan serta diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dimasa yang akan datang.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani Bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,


JAYA WARDANA AP, S.E.,M.Ec.Dev
NIP. 19740702 199403 1 011

PIHAK KEDUA,


dr. DADANG BASKORO NUGROHO, Sp.PD.
NIP. 19720209 200212 1 001



BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 000 9 3/ 45 /Rida-Bapp/I/2026

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : JAYA WARDANA AP, S.E.,M.Ec.Dev
NIP : 19740702 199403 1 011
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. MANAT SIMANJUNTAK, S.Pd., M.Pd
NIP : 19710711 199702 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dokumen hasil penyusunan kajian daerah dengan judul "Pendidikan dari Kebudayaan yang Inklusif dan Inovatif untuk daya saing daerah untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan peserta didik di era digital" kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya kajian daerah ini dapat diimplementasikan dan diintegrasikan serta diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dimasa yang akan datang.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani Bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



JAYA WARDANA AP, S.E.,M.Ec.Dev
NIP. 19740702 199403 1 011



Dr. MANAT SIMANJUNTAK, S.Pd., M.Pd
NIP. 19710711 199702 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Pahlawan Km. 06 Buntok, Dusun Selatan, Barito Selatan, Kalimantan Tengah 73711

Telp. (0525) 21015 Faksimile (0525) 21504

Laman www.opd.baritoselatankab.go.id, Pos-el : bappeda@baritoselatankab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 000.9.3/ 34 /Rida-Bapp/1/2026

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : JAYA WARDANA AP, S.E.,M.Ec.Dev
NIP : 19740702 199403 1 011
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : EKA SURYA THANO, SE., M.M
NIP : 19721006 199803 1 014
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dokumen hasil penyusunan kajian daerah dengan judul "Pengembangan Ikan Lokal dalam Rangka Mendukung Kelestarian Sumber Daya Perairan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025" kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya kajian daerah ini dapat diimplementasikan dan diintegrasikan serta diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dimasa yang akan datang.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani Bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

JAYA WARDANA AP, S.E.,M.Ec.Dev
NIP. 19740702 199403 1 011

PIHAK KEDUA,

EKA SURYA THANO, SE., M.M
NIP. 19721006 199803 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Pahlawan Km. 06 Buntok, Dusun Selatan, Barito Selatan, Kalimantan Tengah 73711

Telp. (0525) 21015 Faksimile (0525) 21504

Laman www.opd.baritoselatankab.go.id, Pos-el : bappeda@baritoselatankab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 000.9.3/ 36 /Rida-Bapp/I/2026

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : JAYA WARDANA AP, S.E.,M.Ec.Dev
NIP : 19740702 199403 1 011
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : SARI SAHAYANIE, S.E., M.E.
Jabatan : Direktur Badan Usaha Milik Daerah Tirta Barito

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dokumen hasil penyusunan kajian daerah dengan judul "Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah" kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya kajian daerah ini dapat diimplementasikan dan diintegrasikan serta diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dimasa yang akan datang.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani Bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

JAYA WARDANA AP, S.E.,M.Ec.Dev

NIP. 19740702 199403 1 011

PIHAK KEDUA,

SARI SAHAYANIE, S.E., M.E.

SARI SAHAYANIE, S.E., M.E.



BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 000.9.3/34 /Rida-Bapp/1/2026

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : JAYA WARDANA AP, S.E.,M.Ec.Dev
NIP : 19740702 199403 1 011
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Ir. BILIVSON, ST., MT.
NIP : 19750728 200003 1 008
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dokumen hasil penyusunan kajian daerah dengan judul "Kajian Model Pengelolaan Lingkungan Hidup Terintegrasi untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Kabupaten Barito Selatan" kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya kajian daerah ini dapat diimplementasikan dan diintegrasikan serta diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dimasa yang akan datang.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani Bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,


JAYA WARDANA AP, S.E.,M.Ec.Dev
NIP. 19740702 199403 1 011

PIHAK KEDUA,


Ir. BILIVSON, ST., MT.
NIP. 19750728 200003 1 008

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja Tahun 2025 merupakan bagian dari kinerja strategis Bapperida Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Pada tahun 2025 terdapat kondisi khusus, yaitu sebagai masa transisi perencanaan, dimana Renstra Bapperida untuk periode 2025–2029 baru ditetapkan pada bulan September 2025. Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 masih menggunakan dan menampilkan indikator kinerja yang mengacu pada Renstra periode 2023–2026. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi pengukuran kinerja serta memastikan kesinambungan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah dari tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 terdapat beberapa perbedaan pada indikator kinerja yang digunakan. Hal ini disebabkan karena Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan, dimana Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Kabupaten Barito Selatan periode 2025–2029 baru ditetapkan pada bulan September 2025, sementara pada awal tahun pelaksanaan kegiatan masih mengacu pada Renstra periode 2023–2026 yang disajikan pada tabel 3.6 berikut ;

Tabel 3. 7 Indikator, Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

| No | Indikator Kinerja Tahun 2024 (Periode 2023-2026) | Realisasi Kinerja Tahun 2024 | Capaian Kinerja Tahun 2024 |
|-----------|---|---|---|
| 1 | Nilai Sakip BAPPEDA | Capaian kinerja nilai SAKIP masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat | Capaian kinerja nilai SAKIP masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat |
| 2 | Opini BPK | Capaian kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi oleh BPK | Capaian kinerja opini BPK masih dalam tahap evaluasi oleh BPK |
| 3 | Indeks Pencegahan Korupsi MCP KPK/ Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKPD | 74,00 | 92,50% |
| 4 | Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) | 100% | 100% |
| 5 | Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA | Inovatif | 100% |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 6 | Jumlah Kajian Kelitbangan yang di implementasikan | 3 Kajian | 300% |
| | Indikator Kinerja Tahun 2025 (Periode 2025-2029) | Realisasi Kinerja Tahun 2025 | Capaian Kinerja Tahun 2025 |
| 1 | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | Indeks Perencanaan Pembangunan daerah masih dalam proses oleh Bapperida Provinsi Kalimantan tengah (hasil belum rilis) | Indeks Perencanaan Pembangunan daerah masih dalam proses oleh Bapperida Provinsi Kalimantan tengah (hasil belum rilis) |
| 2 | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Tidak dilakukan penilaian oleh BPKP karena yang dilakukan penilaian hanya yang menjadi sampel. | Tidak dilakukan penilaian oleh BPKP karena yang dilakukan penilaian hanya yang menjadi sampel. |
| 3 | Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah | 89,78 | 112% |
| 4 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah | B | 100% |
| 5 | Persentase Kebijakan Berbasis Bukti | 14 kajian | 93% |
| 6 | Indeks Inovasi Daerah | Inovatif | 100% |

Penyajian indikator kinerja pada tabel di atas masih menampilkan indikator kinerja dari Renstra Bapperida Kabupaten Barito Selatan periode 2023–2026, mengingat pada awal Tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan masih mengacu pada dokumen perencanaan tersebut. Sementara itu, Renstra periode 2025–2029 baru ditetapkan pada bulan September 2025, sehingga pada laporan kinerja ini juga ditampilkan beberapa indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan Renstra periode yang baru. Dengan demikian, terdapat beberapa indikator yang berbeda maupun indikator yang tetap berlanjut karena memiliki kesesuaian substansi.

Meskipun terdapat beberapa perubahan pada indikator kinerja antara Renstra periode 2023–2026 dengan Renstra periode 2025–2029, pada prinsipnya indikator-indikator tersebut tetap memiliki keterkaitan dan kesinambungan dalam mengukur kinerja Bapperida Kabupaten Barito Selatan. Perubahan indikator dilakukan sebagai bagian dari proses penyempurnaan

pengukuran kinerja agar lebih relevan dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan pembangunan. Beberapa indikator tetap dipertahankan karena dinilai masih relevan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sementara sebagian indikator lainnya mengalami penyesuaian baik dari sisi nomenklatur maupun metode pengukurannya. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengukuran kinerja agar lebih terukur, spesifik, dan berorientasi pada hasil (outcome).

Dengan demikian, penyajian indikator lama dan indikator baru dalam laporan kinerja Tahun 2025 diharapkan tetap dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan capaian kinerja Bapperida Kabupaten Barito Selatan sekaligus menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Renstra Bappeda Kabupaten Barito Selatan memiliki fokus pada penajaman tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dengan merunut pada cascading RPD dengan meta program yang merupakan matriks untuk mendeskripsikan bagaimana proses bisnis program perangkat daerah (dalam hal ini Bappeda Kabupaten Barito Selatan) secara hierarki terkait dan memberikan dukungan pada capaian Sasaran Kepala Daerah, capaian program Pemerintah Daerah (Program Pemda), capaian sasaran perangkat daerah, serta bagaimana proses bisnis kegiatan beserta indikator keluaran (output) mendukung capaian hasil (outcome) program sesuai dengan kerangka logis cascading RPD Kabupaten Barito Selatan 2025-2029. Berikut ini adalah tabel capaian kinerja dan target kinerja dalam Rencana Strategis:

Tabel 3. 8 Pengukuran Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Target

| No | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja | Target Dalam Rencana Strategis |
|----|---|--|--------------------------------|
| 1 | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | Indeks Perencanaan Pembangunan daerah masih dalam proses oleh Bapperida Provinsi Kalimantan tengah (hasil belum rilis) | BAIK |
| 2 | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Tidak dilakukan penilaian oleh BPKP karena yang dilakukan penilaian hanya yang menjadi sampel. | 3,10 |
| 3 | Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah | 89,78 | 80,00 |
| 4 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah | B | B |
| 5 | Persentase Kebijakan Berbasis Bukti | 14 kajian | 71% |
| 6 | Indeks Inovasi Daerah | Inovatif | Inovatif |

3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Realisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2024 tidak ada yang dapat dibandingkan dengan standar nasional.

Tabel 3. 9 Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional

| No | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja | Standar Nasional |
|----|--|--|----------------------------|
| 1 | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | Indeks Perencanaan Pembangunan daerah masih dalam proses oleh Bapperida Provinsi Kalimantan tengah (hasil belum rilis) | Tidak ada standar nasional |
| 2 | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Tidak dilakukan penilaian oleh BPKP karena yang dilakukan penilaian hanya yang menjadi sampel. | Tidak ada standar nasional |
| 3 | Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah | 89,78 | Tidak ada standar nasional |

| | | | |
|---|---|-----------|----------------------------|
| 4 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah | B | Tidak ada standar nasional |
| 5 | Persentase Kebijakan Berbasis Bukti | 14 kajian | Tidak ada standar nasional |
| 6 | Indeks Inovasi Daerah | Inovatif | Tidak ada standar nasional |

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program /kegiatan di masa yang akan datang.

Tabel 3. 10 Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional

| No | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Faktor Keberhasilan/kegagalan | Alternative Solusi yang telah dilakukan |
|----|---|----------------|--|---|--|
| 1 | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | BAIK | Indeks Perencanaan Pembangunan daerah masih dalam proses oleh Bapperida Provinsi Kalimantan tengah (hasil belum rilis) | Indeks Perencanaan Pembangunan daerah masih dalam proses oleh Bapperida Provinsi Kalimantan tengah (hasil belum rilis) | Indeks Perencanaan Pembangunan daerah masih dalam proses oleh Bapperida Provinsi Kalimantan tengah (hasil belum rilis) |
| 2 | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 3,10 | Tidak dilakukan penilaian oleh BPKP karena yang dilakukan penilaian hanya yang menjadi sampel. | Tidak dilakukan penilaian oleh BPKP karena yang dilakukan penilaian hanya yang menjadi sampel. | Tidak dilakukan penilaian oleh BPKP karena yang dilakukan penilaian hanya yang menjadi sampel. |
| 3 | Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah | 80,00 | 89,78 | Meningkatkan koordinasi Bapperida Kabupaten Barito Selatan dalam memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan daerah | Penguatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam pemenuhan indikator MCP, peningkatan kualitas pengelolaan dokumen dan data dukung, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pemenuhan indikator pada area intervensi MCP. |
| 4 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah | B | B | Capaian kinerja nilai SAKIP masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat (hasil belum rilis) | Capaian kinerja nilai SAKIP masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat (hasil belum rilis) |
| 5 | Persentase Kebijakan Berbasis Bukti | 71% | 14 kajian | Dukungan penda terhadap kajian kelitbangan yang dijadikan dasar untuk mengambil keputusan untuk kebijakan suatu daerah. | Melaksanakan perjanjian kerjasama tentang pembuatan kajian naskah akademis. |

| | | | | | |
|---|-----------------------|----------|----------|--|--|
| 6 | Indeks Inovasi Daerah | Inovatif | Inovatif | Melakukan inventarisasi inovasi ke perangkat daerah secara langsung sehingga dapat di ikut sertakan dalam nominasi IGA | Menjaring lebih banyak inovasi daerah dan memberikan hadiah terhadap inovasi yang memenuhi syarat. |
|---|-----------------------|----------|----------|--|--|

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pengukuran efektivitas bisa dilakukan hanya dengan mengukur outcome. Suatu pelayanan mungkin dilakukan secara efisien, namun belum tentu efektif. Oleh karena itu indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama. Jika suatu program dinyatakan efektif dan efisien maka program tersebut dapat dikatakan cost-effectiveness. Untuk melihat hubungan antara anggaran yang digunakan dan kinerja yang dicapai maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi Anggaran} = (\text{Capaian Kinerja} / \text{Realisasi Anggaran}) \times 100\%$$

Keterangan:

Jika Efisiensi Kinerja >100% maka anggaran digunakan secara optimal

Jika Efisiensi Kinerja <100% ada indikasi inefisiensi dalam penggunaan anggaran

Tabel 3. 11 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Capaian Kinerja

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja (%) | Serapan Anggaran (%) | Tingkat Efisiensi (%) |
|----|---|---|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | Meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Barito Selatan. | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | Indeks Perencanaan Pembangunan daerah masih dalam proses oleh Bapperida Provinsi Kalimantan tengah (hasil belum rilis) | 96,10 | |
| | | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Tidak dilakukan penilaian oleh BPKP karena yang dilakukan penilaian hanya yang menjadi sampel. | 96,64 | - |
| | | Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah | 112% | 96,10 | |
| | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah | 100% | 88,08 | |
| 3 | Penerapan ekonomi hijau dan Energi Baru Terbarukan (EBT) Kabupaten Barito Selatan. | Persentase Kebijakan Berbasis Bukti | 100% | 80,89 | |
| | | Indeks Inovasi Daerah | 100% | 94,21 | |

Dari tabel diatas dapat dilihat berapa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya jika dikaitkan dengan capaian kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya dianalisis dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan tingkat serapan anggaran pada setiap indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis menunjukkan tingkat efisiensi yang baik.

1. Pada indikator Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah, capaian kinerja mencapai 112% dengan tingkat serapan anggaran sebesar 96,10%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja mampu melampaui target yang telah ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang masih berada di bawah 100%, sehingga mencerminkan pelaksanaan program yang efektif dan efisien.
2. Selanjutnya pada indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah, capaian kinerja mencapai 100% dengan tingkat serapan anggaran sebesar 88,08%. Kondisi ini menunjukkan bahwa target kinerja dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari alokasi yang tersedia, sehingga menggambarkan adanya efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya.
3. Pada sasaran strategis terkait penerapan ekonomi hijau dan energi baru terbarukan, indikator Persentase Kebijakan Berbasis Bukti dan Indeks Inovasi Daerah masing-masing mencapai 100%, dengan tingkat serapan anggaran sebesar 80,89% dan 94,21%. Capaian ini menunjukkan bahwa target kinerja dapat dipenuhi secara optimal dengan pemanfaatan anggaran yang relatif efisien, khususnya pada indikator kebijakan berbasis bukti yang mampu mencapai target dengan tingkat serapan anggaran yang cukup rendah.
4. Sementara itu, pada indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, hasil capaian belum dapat dianalisis karena hasil penilaian masih dalam proses dan belum dirilis oleh instansi yang berwenang. Adapun untuk indikator Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dilakukan penilaian oleh BPKP karena penilaian hanya dilakukan pada instansi yang menjadi sampel pada tahun berjalan.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian sasaran strategis telah dilakukan secara efisien. Hal ini tercermin dari kemampuan organisasi dalam mencapai bahkan melampaui target kinerja dengan tingkat serapan anggaran yang tidak melebihi alokasi yang tersedia. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa proses perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Pencapaian kinerja perangkat daerah merupakan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran secara terencana dan terukur. Program dan kegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi melalui penguatan proses perencanaan pembangunan, peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta pengembangan penelitian, inovasi, dan kebijakan berbasis bukti. Dukungan anggaran yang dialokasikan pada masing-masing program menjadi faktor penting dalam memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Adapun pencapaian tersebut diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 12 Indikator, Target, Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025

| Indikator | Target | Capaian | Program | Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|---|--------|--|---|--|---------------|---------------|
| Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | Baik | Indeks Perencanaan Pembangunan daerah masih dalam proses oleh Bapperida Provinsi Kalimantan tengah (hasil belum rilis) | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 89.6664.000 | 861.646.994 |
| Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 3,10 | Tidak dilakukan penilaian oleh BPKP karena yang dilakukan penilaian hanya yang menjadi sampel. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 236.938.800 | 228.989.094 |
| Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah | 80,00 | 112% | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | |
| Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah | B | 100% | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 236.938.800 | 228.989.094 |
| Persentase Kebijakan Berbasis Bukti | 71 | 100% | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang | 4.972.362.850 | 3.078.204.617 |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------|------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | Ekonomi dan Pembangunan 3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | |
| Indeks Inovasi Daerah | Inovatif | 100% | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Invensi dan Inovasi | 205.000.000 | 165.830.625 |

Dari tabel 3.10 yang disajikan ini dapat dilihat bahwa untuk mencapai setiap indikator kinerja telah ditetapkan program, kegiatan dan anggaran yang dapat mendukung pencapaian setiap target kinerja. Berikut analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja :

1. Pada indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, capaian kinerja diukur melalui penilaian yang dilakukan oleh Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah. Indikator ini didukung melalui Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp89.666.000 dengan realisasi sebesar Rp61.646.994 yang dimanfaatkan untuk memperkuat proses perencanaan, koordinasi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Pada indikator Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan target 3,10, penilaian pada tahun berjalan belum dilakukan oleh BPKP karena penilaian hanya dilakukan pada instansi yang menjadi sampel. Meskipun demikian, upaya penguatan tata kelola dan sistem pengendalian internal tetap dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp236.938.800 dan realisasi sebesar Rp228.989.094.
3. Pada indikator Angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah, capaian kinerja mencapai 112%, melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, khususnya melalui kegiatan yang berfokus pada penguatan koordinasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah sehingga mendorong peningkatan nilai MCP sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Pada indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah, capaian kinerja mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini didukung melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang didukung anggaran sebesar Rp236.938.800 dengan realisasi sebesar Rp228.989.094. Program dan kegiatan tersebut berperan dalam meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan kinerja perangkat daerah.
5. Pada indikator Persentase Kebijakan Berbasis Bukti, capaian kinerja mencapai 100%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 71%. Capaian ini didukung oleh Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.972.362.850 dan realisasi sebesar Rp3.078.204.617. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, kependudukan, ekonomi, serta pengembangan inovasi dan teknologi yang menghasilkan berbagai kajian dan rekomendasi kebijakan sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan daerah.
6. Selanjutnya pada indikator Indeks Inovasi Daerah, capaian kinerja mencapai 100%. Capaian ini didukung oleh pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui kegiatan Inovasi dan Inovasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp205.000.000 dan realisasi sebesar Rp165.830.625, yang diarahkan untuk mendorong pengembangan inovasi daerah serta meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam menciptakan inovasi pelayanan publik.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja tersebut menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang tersedia telah berkontribusi secara efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Sinergi antara perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan anggaran yang tepat menjadi faktor penting dalam memastikan tercapainya target kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 14.139.728.858,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.662.934.542,- dengan rincian pada table berikut ini :

Tabel 3. 13 Realisasi Anggaran Bappeda Tahun Anggaran 2025

| No | PROGRAM / KEGIATAN | PAGU APBD (Rp.) | REALISASI APBD | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-------|----------------|--|
| | | | REALISASI KEUANGAN | | REAL FISIK (%) | |
| | | | Rp | (%) | | |
| | 5.01 PERENCANAAN | | | | | |
| | 01.00 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | |
| 1 | 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| I | 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | |
| 1 | 5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 33.606.100 | 33.373.265 | 99,31 | 99,31 | |
| 2 | 5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 28.276.000 | 27.890.735 | 98,64 | 98,64 | |
| 3 | 5.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 27.065.000 | 26.860.625 | 99,24 | 99,24 | |
| 4 | 5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 14.370.700 | 14.098.085 | 98,10 | 98,10 | |
| 5 | 5.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 17.871.000 | 17.550.915 | 98,21 | 98,21 | |
| 6 | 5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 26.281.000 | 26.231.076 | 99,81 | 99,81 | |
| 7 | 5.02.01.2.01.01 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 89.469.000 | 82.984.393 | 92,75 | 92,75 | |
| II | 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | |
| 1 | 5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.257.528.620 | 4.614.601.156 | 87,77 | 87,77 | |
| 2 | 5.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 254.732.500 | 245.091.750 | 96,22 | 96,22 | |
| 3 | 5.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 14.927.000 | 14.806.867 | 99,20 | 99,20 | |
| 4 | 5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12.955.000 | 12.850.673 | 99,19 | 99,19 | |
| 5 | 5.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 8.363.500 | 8.213.857 | 98,21 | 98,21 | |

| | | | | | | |
|------------|--|---|-------------|-------------|--------|--------|
| 6 | 5.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 17.344.000 | 17.113.245 | 98,67 | 98,67 |
| III | 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | |
| 1 | 5.01.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 6.977.500 | 6.738.822 | 96,58 | 96,58 |
| 2 | 5.01.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 22.111.600 | 22.010.000 | 99,54 | 99,54 |
| IV | 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | |
| 1 | 5.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | 19.640.000 | 18.180.000 | 92,57 | 92,57 |
| 2 | 5.01.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 11.350.000 | 11.156.003 | 98,29 | 98,29 |
| 3 | 5.01.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 46.482.900 | 16.882.739 | 36,32 | 36,32 |
| 4 | 5.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 230.000.000 | 230.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| V | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | |
| 1 | 5.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 34.476.000 | 34.468.673 | 99,98 | 99,98 |
| 2 | 5.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 28.087.500 | 27.736.556 | 98,75 | 98,75 |
| 3 | 5.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 16.765.000 | 16.716.373 | 99,71 | 99,71 |
| 4 | 5.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 32.800.000 | 32.788.156 | 99,96 | 99,96 |
| 5 | 5.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 45.050.000 | 42.691.636 | 94,77 | 94,77 |
| 6 | 5.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 426.975.000 | 351.529.426 | 82,33 | 82,33 |
| 7 | 5.01.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 8.972.500 | 8.777.414 | 97,83 | 97,83 |
| VI | 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | |
| 1 | 5.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | 45.798.800 | 45.725.178 | 99,84 | 99,84 |

| | | | | | | |
|-------------|---|--|-------------|-------------|-------|-------|
| 2 | 5.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 89.410.000 | 78.916.750 | 88,26 | 88,26 |
| 3 | 5.01.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | | | | |
| VII | 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | |
| 1 | 5.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7.200.000 | 7.196.000 | 99,94 | 99,94 |
| 2 | 5.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 163.412.444 | 143.328.355 | 87,71 | 87,71 |
| 3 | 5.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 61.700.000 | 59.656.807 | 96,69 | 96,69 |
| 4 | 5.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 255.780.000 | 182.569.000 | 71,38 | 71,38 |
| VIII | 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | |
| 1 | 5.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 62.946.000 | 35.609.860 | 56,57 | 56,57 |
| 2 | 5.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 14.200.000 | 12.084.400 | 85,10 | 85,10 |
| 3 | 5.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 177.792.500 | 177.203.990 | 99,67 | 99,67 |
| 4 | 5.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | 32.495.000 | 28.244.078 | 86,92 | 86,92 |
| 2 | 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | |
| I | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | | | | | |
| 1 | 5.01.02.2.01.03 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | 45.190.000 | 45.076.065 | 99,75 | 99,75 |
| 2 | 5.01.02.2.01.04 | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | 33.939.000 | 25.894.650 | 76,30 | 76,30 |
| 3 | 5.01.02.2.01.05 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 38.305.000 | 28.882.550 | 75,40 | 75,40 |
| 4 | 5.01.02.2.01.06 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | 61.260.000 | 60.263.297 | 98,37 | 98,37 |
| 5 | 5.01.02.2.01.07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 717.950.000 | 701.530.432 | 97,71 | 97,71 |

| | | | | | | |
|------------|---|---|-------------|-------------|-------|-------|
| II | 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | |
| 1 | 5.01.02.2.02.01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 61.836.000 | 59.291.825 | 95,89 | 95,89 |
| 2 | 5.01.02.2.02.02 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | 64.500.000 | 53.737.315 | 83,31 | 83,31 |
| 3 | 5.01.02.2.02.03 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 14.096.000 | 13.656.315 | 96,88 | 96,88 |
| III | 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | |
| 1 | 5.01.02.2.03.01 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | 82.627.000 | 38.836.075 | 47,00 | 47,00 |
| 2 | 5.01.02.2.03.03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 127.976.000 | 78.285.257 | 61,17 | 61,17 |
| 3 | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | |
| I | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | | |
| 1 | 5.01.03.2.01.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 120.400.000 | 115.530.100 | 95,96 | 95,96 |
| 2 | 5.01.03.2.01.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 38.350.000 | 32.234.300 | 84,05 | 84,05 |
| 3 | 5.01.03.2.01.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 34.649.000 | 32.764.400 | 94,56 | 94,56 |
| 4 | 5.01.03.2.01.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 36.563.000 | 34.484.150 | 94,31 | 94,31 |

| | | | | | | |
|-----------|---|--|-------------|-------------|--------|--------|
| 5 | 5.01.03.2.01.05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 136.400.000 | 88.030.850 | 64,54 | 64,54 |
| 6 | 5.01.03.2.01.06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 116.378.000 | 73.125.324 | 62,83 | 62,83 |
| 7 | 5.01.03.2.01.07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 100.800.000 | 99.459.699 | 98,67 | 98,67 |
| 8 | 5.01.03.2.01.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 222.575.000 | 212.569.910 | 95,50 | 95,50 |
| II | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | | | |
| 1 | 5.01.03.2.02.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 128.932.000 | 128.905.690 | 99,98 | 99,98 |
| 2 | 5.01.03.2.02.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 5.000.000 | 4.999.760 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 5.01.03.2.02.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 28.984.000 | 21.629.000 | 74,62 | 74,62 |

| | | | | | | |
|------------|---|--|-------------|-------------|-------|-------|
| 4 | 5.01.03.2.02.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 57.738.000 | 57.598.300 | 99,76 | 99,76 |
| 5 | 5.01.03.2.02.05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 141.622.000 | 141.581.770 | 99,97 | 99,97 |
| 6 | 5.01.03.2.02.06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 4.989.500 | 4.986.685 | 99,94 | 99,94 |
| 7 | 5.01.03.2.02.07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 11.966.000 | 11.826.000 | 98,83 | 98,83 |
| 8 | 5.01.03.2.02.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | 16.220.000 | 16.126.500 | 99,42 | 99,42 |
| III | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | | |
| 1 | 5.01.03.2.03.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 62.830.000 | 59.751.250 | 95,10 | 95,10 |
| 2 | 5.01.03.2.03.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 4.400.000 | 4.378.400 | 99,51 | 99,51 |
| 3 | 5.01.03.2.03.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 111.413.000 | 111.099.475 | 99,72 | 99,72 |
| 4 | 5.01.03.2.03.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 290.651.000 | 235.530.473 | 81,04 | 81,04 |

| | | | | | | |
|---|--|--|-------------|-------------|--------|--------|
| 5 | 5.01.03.2.03.05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 36.000.000 | 34.036.025 | 94,54 | 94,54 |
| 6 | 5.01.03.2.03.06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan D | 4.530.000 | 4.519.500 | 99,77 | 99,77 |
| 7 | 5.01.03.2.03.07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 35.859.000 | 32.835.100 | 91,57 | 91,57 |
| 8 | 5.01.03.2.03.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | 29.071.000 | 23.566.000 | 81,06 | 81,06 |
| 01.00 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | |
| 4 | 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | |
| I | Penelitian dan Pengembangan Bidang Siosial dan Kependudukan | | | | | |
| 1 | 5.05.02.2.02.0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | 160.027.000 | 160.021.991 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 5.05.02.2.02.0003 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | 160.387.000 | 160.380.250 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 5.05.02.2.02.0004 | Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga | - | - | - | - |
| 4 | 5.05.02.2.02.0006 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | 160.387.000 | 160.378.000 | 99,99 | 99,99 |
| 5 | 5.05.02.2.02.0006 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | 203.387.000 | 203.352.351 | 99,98 | 99,98 |
| 6 | 5.05.02.2.02.0007 | Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 160.015.000 | 160.010.379 | 100,00 | 100,00 |
| II | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|---|-------------|-------------|--------|--------|
| 1 | 5.05.02.2.03.01 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 203.387.000 | 203.354.153 | 99,98 | 99,98 |
| 2 | 5.05.02.2.03.0002 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | 160.387.000 | 160.364.380 | 99,99 | 99,99 |
| | 5.05.02.2.03.0003 | Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah | 202.883.200 | 202.869.280 | 99,99 | 99,99 |
| | 5.05.02.2.03.0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 214.942.444 | 214.922.391 | 99,99 | 99,99 |
| | 5.05.02.2.03.0005 | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | 202.921.000 | 202.916.000 | 100,00 | 100,00 |
| | 5.05.02.2.03.0008 | Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | 202.887.000 | 202.871.668 | 99,99 | 99,99 |
| | 5.05.02.2.03.0007 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | 159.387.000 | 159.376.681 | 99,99 | 99,99 |
| | 5.05.02.2.03.0008 | Penelitian dan Pengembangan kehutanan | - | - | - | - |
| | 5.05.02.2.03.0009 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | 159.387.000 | 159.369.869 | 99,99 | 99,99 |
| III | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | | |
| 1 | 5.05.02.2.04.0001 | Penelitian, Pengembangan, Dan Perekrayasaan Di Bidang Teknologi Dan Inovasi | 226.090.750 | 182.533.459 | 80,73 | 80,73 |
| 2 | 5.05.02.2.04.0002 | Uji oba dan Penerapan Rancang Bangun Model Replika dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 52.487.950 | 43.285.143 | 82,47 | 82,47 |
| 3 | 5.05.02.2.04.0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang Bersifat Inovatif | 150.290.000 | 83.710.045 | 55,70 | 55,70 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|----------------|----------------|-------|-------|
| 4 | 5.05.02.2.04.0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | 84.547.850 | 82.146.400 | 97,16 | 97,16 |
| 5 | 5.05.02.2.04.0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Internal | 243.329.000 | 175.991.699 | 72,33 | 72,33 |
| 5 | 5.05.02 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | | | | | |
| I | Invensi dan Inovasi | | | | | |
| 1 | 5.05.03.2.02.0002 | Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi | 205.000.000 | 165.830.625 | 80,89 | 80,89 |
| TOTAL | | | 14.139.728.858 | 12.662.934.542 | 89,56 | 89,56 |

Realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Barito Selatan pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan cukup baik dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja perangkat daerah. Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp14.139.728.858 dengan realisasi sebesar Rp12.662.934.542 atau 89,56% dari total anggaran yang tersedia. Tingkat penyerapan anggaran tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif serta mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Apabila dikaitkan dengan capaian kinerja organisasi, penggunaan anggaran tersebut secara umum menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik. Hal ini terlihat dari beberapa indikator kinerja yang mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dengan tingkat penyerapan anggaran yang relatif efisien. Seperti pada indikator Indeks Inovasi Daerah (IGA), capaian kinerja dapat mencapai target yang ditetapkan dengan tingkat serapan anggaran yang tidak sepenuhnya digunakan secara maksimal, yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilaksanakan secara efisien dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Selain itu, capaian indikator jumlah kajian kelitbangan yang diimplementasikan juga menunjukkan hasil yang optimal dimana target yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan rencana. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan mampu memberikan kontribusi terhadap penyediaan data dan kajian strategis yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian, terdapat beberapa indikator kinerja yang capaian akhirnya masih menunggu hasil evaluasi dari instansi terkait, seperti indikator nilai SAKIP dan Opini BPK, sehingga tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada indikator tersebut belum dapat dianalisis secara menyeluruh pada saat penyusunan laporan ini. Secara keseluruhan, hubungan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya keuangan pada BAPPERIDA Kabupaten Barito Selatan telah dilaksanakan secara

cukup efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran ini akan menjadi bahan perbaikan dalam proses perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya sehingga kualitas perencanaan pembangunan daerah dapat terus ditingkatkan dan semakin mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Hal ini ditunjukkan oleh tercapainya sebagian besar indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan tingkat penyerapan anggaran yang cukup optimal. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa alokasi sumber daya keuangan telah dimanfaatkan secara tepat dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran tersebut. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), serta untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Secara umum, capaian kinerja yang dilaporkan dalam LAKIP ini menunjukkan hasil yang cukup baik. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari komitmen dan kerja sama seluruh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara konsisten sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam pencapaian kinerja tersebut juga tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, mengingat keberhasilan pelaksanaan misi kepala daerah hanya dapat terwujud melalui sinergi antara perangkat daerah serta partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pencapaian tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025, dari 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan terdapat 3 (tiga) indikator yang capaian kinerjanya belum dapat disajikan, yaitu Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Nilai SAKIP, karena proses evaluasi terhadap indikator tersebut masih berlangsung. Sementara itu, 3 (tiga) indikator lainnya yaitu Indeks Pencegahan Korupsi (MCP KPK), jumlah kajian berbasis bukti yang dimanfaatkan, serta Indeks Inovasi Daerah telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja yang diperoleh pada Tahun 2025 tersebut tentunya masih perlu terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang agar mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah serta memenuhi tuntutan regulasi yang terus berkembang dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal, termasuk komitmen Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Selain itu, keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari dukungan serta peran aktif seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

2. Langkah strategis di masa mendatang

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas kinerja pemerintah daerah, termasuk di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja SAKIP Bappeda, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:
 - a. Penguatan Perencanaan Kinerja yang Berorientasi Hasil
 - b. Penyempurnaan Pengukuran Kinerja yang Terstruktur dan Terukur
 - c. Mengintegrasikan Sistem Informasi SAKIP dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah untuk memastikan keselarasan program.
 - d. Peningkatan Kapasitas SDM dan Budaya Kinerja
2. Perlu dilakukan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *output* maupun *outcome* kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut kinerja organisasi dapat benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel;
3. Mengembangkan sistem perencanaan dan pengendalian yang terintegrasi agar konsistensi dan komitmen dalam sebuah perencanaan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Untuk itu Bappeda akan menggunakan aplikasi yang akan dimanfaatkan untuk pelaporan capaian kinerja perangkat daerah.
4. Untuk memastikan inovasi daerah memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah. Berikut adalah beberapa strategi utama yang dapat diterapkan:
 - a. Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah yaitu;
 - Membangun ekosistem yang mendukung inovasi dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, serta komunitas masyarakat.
 - Membentuk pusat inovasi atau laboratorium inovasi daerah untuk menampung ide-ide baru dan mengembangkan solusi berbasis data.

- b. Digitalisasi dan Pemanfaatan Teknologi yaitu ;
 - Mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dan tata kelola pemerintahan.
 - Mengembangkan platform digital yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan mengakses layanan inovatif.
 - c. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Aparatur Daerah ;
 - Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam menerapkan inovasi.
 - Mengembangkan program edukasi dan pelatihan berbasis teknologi untuk masyarakat agar mereka dapat lebih mudah beradaptasi dengan inovasi yang diterapkan.
 - d. Penyusunan Kebijakan yang Mendukung Inovasi ;
 - Menerapkan regulasi yang fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial.
 - Memberikan insentif bagi inovator daerah, baik individu maupun organisasi, yang berhasil menciptakan solusi inovatif.
 - e. Pendanaan dan Investasi untuk Inovasi;
 - Mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dan implementasi inovasi daerah.
 - Mendorong kemitraan dengan sektor swasta, startup, serta lembaga donor dalam mendukung pembiayaan inovasi.
 - f. Mendorong Inovasi Berbasis Potensi Lokal
 - Mengembangkan inovasi yang berakar pada kearifan lokal dan potensi unggulan daerah, seperti sektor pertanian, pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi digital.
 - Memanfaatkan sumber daya lokal untuk menciptakan solusi yang lebih relevan dan berkelanjutan.
 - g. Evaluasi dan Pengukuran Dampak Inovasi
 - Membuat mekanisme evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas dan dampak inovasi yang telah diterapkan.
 - Menyesuaikan strategi inovasi berdasarkan hasil evaluasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang kelitbangan dengan melaksanakan bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan.